

**PERAN AUSTRALIA DALAM MENGEMBANGKAN  
*CAPACITY BUILDING* BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
(BNN) REPUBLIK INDONESIA UNTUK MENANGANI  
KEJAHATAN NARKOTIKA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Sosial (S.Sos.) dalam Bidang Hubungan Internasional**



**Oleh:**

**FETTY FIDYATUS SHOLIAH**

**NIM. I02219013**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

**2022**

## PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fetty Fidyatus Sholihah  
NIM : I02219013  
Program Studi : Hubungan Internasional  
Yang berjudul : **Peran Australia Mengembangkan *Capacity Building* Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia dalam Menangani Kejahatan Narkotika**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 20 Desember 2022

Yang menyatakan



**Fetty Fidyatus Sholihah**

NIM:I02219013

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fetty Fidyatus Sholihah

NIM : 102219013

Program Studi : Hubungan Internasional

Yang berjudul “Peran Australia Mengembangkan *Capacity Building* Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia dalam Menangani Kejahatan Narkotika”, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 25 Desember 2022



Nur Luthfi Hidayatullah, S.IP., M.Hub.Int.  
NIP. 199104092020121012

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi oleh Fetty Fidyatus Sholihah dengan judul: “Peran Australia Mengembangkan *Capacity Building* Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia dalam Menangani Kejahatan Narkotika”. Telah dipertahankan dan dinyatakan Lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal

### TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



Rizki Rahmadini Nurika, S.Hub.Int., M.A.  
NIP. 199003252018012001

Penguji II



Nur Luthfi Hidayatullah, S.IP, M.Hub.Int.  
NIP. 1991049092020121012

Penguji III



Ridha Amaliyah, S.IP., MBA.  
NIP. 201409001

Penguji IV



Zaky Ismail, M.S.I.  
NIP. 198211230211011007

Surabaya, 13 Desember 2022

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



Dr. Abdul Chalik, M.Ag.  
NIP. 197306272000031002

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fetty Fidyatus Sholihah  
NIM : I02219013  
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Politik/Hubungan Internasional  
E-mail address : Fettyfidya1@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi    Tesis    Desertasi    Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

.....  
.....  
.....

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Januari 2023

Penulis



Fetty Fidyatus Sholihah

## ***Abstract***

**Fetty Fidyatus Sholihah, 2022, *Australia's Role in Developing Capacity Building for the Republic of Indonesia's National Narcotics Agency (BNN) in Handling Narcotics Crime***. Undergraduate Thesis Department of International Relations Faculty of Social and Political Sciences State Islamic University of Sunan Ampel Surabaya.

**Key Word:** Narcotics Crime, Role, Capacity Building

*Special skills are needed in dealing with narcotics crimes, both in the process of prosecution and prevention. The handling of narcotics crimes in Indonesia, especially by the National Narcotics Agency, is carried out in several ways, starting with prevention and prosecution activities. There are several obstacles faced by the BNN in handling narcotics crimes, including the lack of capacity of officers, the lack of understanding of officers about the use of technology in the identification process. So that Australia observe that there are several things that can be developed within Indonesia's capacity to deal with narcotics crimes, starting from enforcement skills. This research seeks to explain how Australia's role is in developing Indonesia's capabilities or capacity building in dealing with narcotics crimes. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. Through this method the author explain clearly how Australia plays a role in developing Indonesia's capacity building. The researcher use the concept of capacity building. The conclusion of this research is Australia's role in developing Indonesia's capacity building through conducting activities in the form of training. This training consists of skills, knowledge and attitude training.*

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## Abstrak

**Fetty Fidyatus Sholihah, 2022, *Peran Australia dalam Mengembangkan Capacity Building Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia untuk Menangani Kejahatan Narkotika*, Skripsi Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya.**

**Kata Kunci:** Kejahatan Narkotika, Peran, Pembangunan Kapasitas

Dalam menangani kejahatan narkotika dibutuhkan adanya kemampuan khusus baik dalam proses penindakan atau pencegahan. Penanganan kejahatan narkotika di Indonesia khususnya oleh BNN RI dilakukan melalui beberapa cara dimulai dari kegiatan pencegahan dan penindakan. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi BNN dalam melakukan penanganan kejahatan narkotika, dimulai dari kurangnya kapasitas kemampuan yang dimiliki petugas, kurangnya pemahaman petugas terhadap penggunaan teknologi dalam proses pengidentifikasian. Sehingga Australia melihat terdapat beberapa hal yang dapat dikembangkan di dalam kapasitas kemampuan Indonesia dalam menangani kejahatan narkotika mulai dari keterampilan penindakan dan lain sebagainya. Pada penelitian ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana peran Australia dalam mengembangkan kemampuan atau *capacity building* Indonesia dalam menangani kejahatan narkotika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Melalui metode ini penulis ingin menjelaskan secara jelas bagaimana Australia berperan dalam mengembangkan *capacity building* Indonesia. Peneliti menggunakan konsep *capacity building*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peran Australia dalam mengembangkan *capacity building* Indonesia melalui dengan melakukan kegiatan berupa pelatihan-pelatihan. Pelatihan ini terdiri dari pelatihan keterampilan, pengetahuan dan sikap.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta memberikan kemudahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peran Australia Mengembangkan Capacity Building Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Dalam Menangani Kejahatan Narkotika”**, yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana di bidang studi Hubungan Internasional.

Tak lupa juga shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmatnya sehingga penulisan Proposal Skripsi ini bisa selesai.
2. Ibu Rizki Rahmadini Nurika, S. Hub. Int., M.A selaku Ketua Prodi Hubungan Internasional.
3. Bapak Zaky Ismail, M.S.I. selaku Dosen Wali Penulis.
4. Bapak Nur Luthfi Hidayatullah, S.IP. M.Hub.Int. Selaku dosen Pembimbing. Terima kasih karena telah membimbing penulis dalam proses pengerjaan proposal skripsi ini.
5. Kedua orang tua dan keluarga karena sudah mendukung dan memberikan dorongan kepada saya untuk semangat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Putriani Sholihatun Nisa selaku petugas Direktorat Kerja sama Indonesia telah membantu penulis melakukan penelitian dan bersedia meluangkan waktu untuk melakukan wawancara ,dan juga BNN karena sudah bersedia untuk melakukan wawancara dengan peneliti guna pengambilan data.
7. Ibu Farranthi Shavitri dan Bu Rika Motota selaku petugas Deputy kerja sama BNN RI yang telah membantu penulis melakukan penelitian dan bersedia meluangkan waktu untuk melakukan wawancara dan juga BNN

karena sudah bersedia untuk melakukan wawancara dengan peneliti guna pengambilan data.

8. Teman-teman angkatan 2018-2019 yang sudah membantu dan menyediakan waktu untuk melakukan diskusi terkait topik penelitian, dan juga telah bersedia mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat untuk penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis mengharap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan proposal di masa yang akan datang. Atas saran, kritik, dan bantuannya penulis ucapkan terima kasih.

Surabaya, 24 September 2022

Penulis

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>.....</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DATAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Argumentasi Utama .....	20
<b>BAB II LANDASAN KONSEPTUAL.....</b>	<b>21</b>
A. Peran.....	21
B. Kejahatan Narkotika.....	22
C. Badan Narkotika Nasional (BNN).....	26
D.Peningkatan Kapasitas ( <i>Capacity Building</i> ).....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	36
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	36
C. Level Analisa.....	37
D. Tahap Penelitian .....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	40

G. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	42
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Kapasitas Kemampuan Indonesia dalam Menangani Kejahatan Narkotika Sebelum Adanya Pemfokusan Kerja sama di Bidang <i>Capacity Building</i> dengan Australia.....	43
B. Peran Australia dalam Mengembangkan <i>Capacity Building</i> Indonesia dalam Menangani Kejahatan Narkotika .....	57
1. Peran AFP Mengembangkan <i>Capacity Building</i> BNN dalam Menangani Kejahatan Narkotika.....	58
2. Peran ABF Mengembangkan <i>Capacity Building</i> BNN dalam Menangani Kejahatan Narkotika.....	72
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN 1.....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN 2.....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN 3.....</b>	<b>109</b>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
(Gambar, 2.1 peta jalur masuk penyelundupan).....	26
(Gambar, 4.1 Hibah <i>Dog Run</i> ABF ke BNN) .....	81



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel, 2.1 <i>Capacity Building</i> Indonesia Sebelum dan Sesudah Adanya Kerja sama dengan Australia .....	34
Tabel 4.1 Matriks Kerja Sama di antara Indonesia-Australia.....	84



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada tahun 1960 perkembangan kejahatan transnasional yang melibatkan permasalahan narkoba yang dimulai dari adanya pengedaran, penyelundupan dan penyalahgunaan narkoba ilegal di belahan dunia. Permasalahan tersebut mulai menjadi perhatian utama bagi pemerintahan di berbagai negara, dimana hal tersebut telah ditetapkan sebagai sebuah ancaman nasional yang memerlukan penyelesaian, pemberantasan, dan penanggulangan secara cepat dan efisien. Tidak berbeda dengan kondisi di negara-negara lain, kondisi permasalahan narkoba di Indonesia juga menimbulkan keprihatinan.

Hal ini bukan lain karena posisi negara Indonesia yang berada pada posisi silang Benua Asia dan Australia serta di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Hal ini membuat negara Indonesia rentan terhadap perdagangan dan penyelundupan ilegal narkoba dan obat-obatan terlarang. Kondisi geografis Indonesia yang dikelilingi oleh lautan dan terdiri dari banyak kepulauan dimana menimbulkan ketertarikan bagi sindikat narkoba internasional untuk menyelundupkan barang terlarang tersebut. Jaringan peredaran narkoba ilegal di Indonesia maupun internasional membuat banyak kerugian bagi negara Indonesia secara ekonomi, sosial dan politik<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Mangai Natarajan, 2015, *Kejahatan Dan Pengadilan Internasional*, Bandung : Nusa Media hal 345

Dalam menangani kejahatan narkoba, Indonesia melakukan kerja sama dengan beberapa negara. Salah satunya yakni dengan menggandeng Australia sebagai mitra kerja sama. Terdapat beberapa alasan mengapa Indonesia memilih Australia sebagai mitra kerja sama. Kedua negara ini menjadi jalur lalu lintas terjadinya peredaran dan penyelundupan narkoba di dunia sehingga memunculkan kesamaan kepentingan yang menjadikan kerja sama ini terjalin. Australia memiliki kemampuan dalam penindakan, juga kualitas dari petugas penegakan hukum yang dinilai lebih baik dari Indonesia. Kondisi geografis yang berdekatan juga menjadi alasan mengapa terjadi kerja sama antara kedua negara.<sup>2</sup>

Hubungan antara Indonesia dan Australia sendiri telah terjalin sejak lama. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia dibuka sejak tahun 1949. Dasar hubungan di antara kedua negara ini juga terbilang kokoh mengingat komitmen kedua negara yang mengembangkan *good neighborliness*.<sup>3</sup> Kerja sama antara Indonesia-Australia di bidang kejahatan transnasional dimulai sejak penandatanganan *Memorandum of Understanding (MOU) between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia on Combating Transnational Crime and Developing Police Cooperation Provides the formal framework for cooperation between Australia and Indonesia in law enforcement*. MOU ini ditandatangani pada tanggal 13 Juni 2002 dan

---

<sup>2</sup> Putriani Sholihatun Nisa, petugas Bea Cukai sub-bagian Kerjasama Internasional Indonesia-Australia, wawancara.

<sup>3</sup> Yeni Wijayanti, 2021, *Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia-Australia Tahun 1945-1995*, *jurnal Artefak*. hal. 52

diratifikasi di bulan September 2002.<sup>4</sup> Selanjutnya kerja sama Indonesia-Australia diperkuat dengan adanya kerja sama khusus di bidang narkoba yang disepakati dan ditandatangani oleh *Australian Federal Police (AFP)* dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) di tahun 2011, dan disusul pada tahun 2018 ditandatangani oleh *Australian Border Force (ABF)* dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).<sup>5</sup>

Meskipun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia terbilang kuat, akan tetapi hal ini tidak lepas dari adanya konflik di antara keduanya, terlebih adanya kasus Bali Nine di tahun 2005. Kasus Bali Nine adalah kasus penyelundupan narkoba yang dilakukan oleh sembilan orang Australia yang membentuk sebuah kelompok, dimana dua di antaranya adalah otak dari kejahatan yang dilakukan. Dua orang yang menjadi otak dari kasus ini dikenai hukuman mati oleh Indonesia. Hal ini mengundang ketidaksetujuan dari Australia, mengingat para sindikat tersebut berasal dari Australia tersebut. Australia mengecam hukuman mati yang diberikan Indonesia kepada dua warga negaranya, hal ini dinilai telah melanggar Hak Asasi Manusia. Meskipun demikian Indonesia tetap kukuh terhadap hukuman tersebut, sehingga eksekusi mati telah dilakukan di tahun 2015.<sup>6</sup>

Adanya hukuman mati yang diberlakukan di Indonesia mempengaruhi perkembangan kerja sama antara Indonesia dan Australia di bidang kejahatan

---

<sup>4</sup>Australian Federal Police, 2002, *inquiry into australia's relation with Indonesia, Australian federal police submission*, No.6, hal. 6

<sup>5</sup> The hon Brendan O'connor MP, 2011, nota kesepahaman untuk memerangi perdagangan obat-obatan terlarang. [https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SMHAJM11\\_002.html](https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SMHAJM11_002.html)

<sup>6</sup> CNN Indonesia, 2018, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181121135528-12-348095/memori-atas-kasus-bali-nine-sindikat-penyelundup-narkoba>

narkotika. Mengingat sebelum adanya kasus Bali Nine, hubungan kerja sama antara Indonesia-Australia di bidang narkotika, khususnya kerja sama yang terjalin antara BNN dengan AFP maupun ABF terbilang cukup membantu dalam menangani kejahatan narkotika yang bersifat internasional. Dimana Australia melakukan operasi bersama dengan Indonesia dalam upaya penindakan kejahatan narkotika dan juga aktif memberikan informasi terkait perkembangan kasus narkoba yang sedang berlangsung di Australia, mulai dari identitas, modus oknum yang sedang populer, kemungkinan akan adanya penyelundupan dan lain sebagainya. Akan tetapi hal ini tidak lagi dilakukan, mengingat adanya kasus Bali Nine, membuat dua warga negara Australia yang dieksekusi mati yang menjadikan Australia membatasi informasi apabila terdapat sindikat narkotika yang ada keterhubungan warga negara Australia di dalamnya. Sehingga kerja sama di antara keduanya kini lebih berfokus terhadap perkembangan *capacity building* Indonesia di bidang narkotika.<sup>7</sup>

*Capacity building* ini sendiri terdiri dari peningkatan kemampuan, keahlian Indonesia dalam menangani kejahatan narkotika. Selain adanya keterpengaruhannya setelah terjadinya kasus Bali Nine, Australia sepakat untuk melakukan kerja sama di bidang peningkatan kemampuan Indonesia dalam merespon kejahatan narkotika, hal ini juga berlaku terhadap kerja sama yang terjalin dengan BNN. Dikarenakan Australia menilai kemampuan Indonesia terutama para petugas badan penegak hukum sangat kurang. Australia menilai

---

<sup>7</sup> Tri Wahono, 2019, Peranan Polri Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Boyolali (Studi Kasus Di Polres Boyolali), *Jurnal Bedah Hukum*, Vol.3, No.2. hal. 3

secara umum kualitas personil badan penegak hukum masih sangat rendah, khususnya sikap moral dan perilaku beberapa oknum masih ada yang menyimpang, dimana cenderung mencari keuntungan pribadi, dengan cara mengkomersialkan kasus narkoba dan bahkan ada yang menjadi sokongan mereka, dan lain sebagainya. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki membuat kendala dalam mengejar dan menangkap kelompok pengedar. Minimnya petugas yang memahami dan dapat menguasai teknologi yang digunakan para sindikat narkoba untuk melancarkan aksi kejahatannya.<sup>8</sup>

Pernyataan dari Australia didukung dengan apa yang dikemukakan oleh Bu Rika Motota petugas BNN (Badan Narkotika Nasional) RI sub-bagian kerja sama internasional Indonesia-Australia, bahwasanya kurangnya keahlian dan kemampuan penegak hukum dalam menangani kejahatan narkoba menjadi salah satu hambatan dalam melaksanakan penindakan dalam negeri.<sup>9</sup> Selain itu terkait sarana dan prasarana BNN mengalami kendala pada bidang ini khususnya pada alat teknologi yang dapat membantu untuk mengidentifikasi kejahatan narkoba seperti fasilitas Laboratorium yang kurang memadai, selain teknologi BNN juga memiliki keterbatasan dana dalam proses penindakan kejahatan, hal ini menunjukkan kurangnya manajemen keuangan dalam penanganan kejahatan narkoba.<sup>10</sup> Berdasarkan pendapat Australia yang telah didukung dengan adanya fakta di lapangan terkait kondisi penanganan

---

<sup>8</sup>Indonesia embassy, 2011, *Archived Media Release Minister for Home Affairs and Justice The Hon Brendan O'Connor MP*, , [https://indonesia.embassy.gov.au/jakt/MRHAJM11\\_002.html](https://indonesia.embassy.gov.au/jakt/MRHAJM11_002.html)

<sup>9</sup> Rika,petugas BNN sub-bagian kerjasama internasional Indonesia-Australia, wawancara

<sup>10</sup> Ira Helviza, 2016, Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Banda Aceh, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, Volume 1, Nomor 1. Hal. 125

kejahatan narkoba di Indonesia, menjadikan kerja sama di antara Indonesia-Australia di bidang narkoba dinilai akan sangat membantu mengembangkan *capacity building* Indonesia khususnya BNN RI dalam menangani kejahatan narkoba. Australia sendiri menilai dengan meningkatnya dan berkembangnya kemampuan Indonesia dalam menangani kejahatan narkoba dalam negeri, baik dari segi penanganan, pencegahan, akan mempengaruhi tingkat kemungkinan kasus narkoba yang akan berhasil diselundupkan ke Australia yang berasal dari Indonesia. Sehingga hal ini akan membawa keuntungan bagi Australia, dikarenakan dengan adanya para aparat penegak hukum yang mempunyai kemampuan yang tinggi dan berkualitas, akan menciptakan sistem penindakan yang bagus pula.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti dapat menemukan sebuah fakta menarik, bahwasanya terdapat perubahan fokus kerja sama antara Indonesia dan Australia setelah adanya kasus Bali Nine, perubahan ini pun terjadi di antara kerja sama yang sedang terjalin di antara BNN dengan ABF maupun AFP, dimana kerja sama tersebut lebih mengarah terhadap peningkatan atau perkembangan *capacity building* yang ada di Indonesia.

Meskipun dengan adanya hubungan yang sempat menegang di masa lalu, akan tetapi tidak menjadikan hubungan diplomatik antara Indonesia-Australia menjadi buruk. Hal ini ditandai dengan adanya kelanjutan kerja sama di bidang narkoba antara Indonesia dan Australia, khususnya peningkatan *capacity*

---

<sup>11</sup> H. Iskandar Hasan dan Nina Naramurti, 2013, *Kerjasama Kepolisian dan Penegakan Hukum Internasional*, Jakarta: PT Firris Bahtera Perkasa hal. 148

*building* Indonesia. Mengingat kemampuan dan keahlian yang dimiliki Indonesia dinilai kurang oleh Australia sesuai penjelasan di atas dalam menangani kejahatan narkoba. Sehingga peneliti ingin melihat bagaimana peran Pemerintah Australia melalui ABF dan AFP dalam mengembangkan *capacity building* yang dimiliki badan penegak hukum kejahatan narkoba Indonesia, yakni BNN. Terkait periode waktu, peneliti menggunakan dua periode waktu yakni sebelum adanya pemfokusan kerja sama di bidang *capacity building* antara Indonesia dan Australia, yakni pada waktu masa kasus Bali Nine berlangsung pada tahun 2005 sampai 2015, dan periode selanjutnya sesudah kasus Bali Nine pada tahun 2016 sampai 2021. Hal ini ditujukan untuk mengetahui peranan Australia dalam mengembangkan kemampuan Indonesia di bidang kejahatan narkoba.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang di atas, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah : **Bagaimana Peran Australia Mengembangkan Capacity Building Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia dalam Menangani Kejahatan Narkoba?**

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Peran Australia Mengembangkan Capacity Building Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia dalam Menangani Kejahatan Narkoba

## **D. Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap pada penelitian ini dapat memberikan manfaat baik dari segi manfaat akademis maupun praktis, di antaranya:

### **1. Manfaat Akademis**

Melalui penelitian ini. Peneliti berharap dapat memberikan kontribusi terhadap konsep *capacity building* dimana dalam melakukan penanganan kejahatan transnasional dalam bentuk kejahatan narkoba dibutuhkan adanya kemampuan yang ahli di bidangnya, mulai dari penanganan, pengidentifikasian. Dimana dengan adanya peningkatan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh para petugas penegak hukum di bidang narkoba, akan dapat membantu meningkatkan efektivitas dan juga kinerja dari penanganan kejahatan narkoba

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat menjadi salah satu sumber masukan bagi instansi yang terlibat seperti khususnya BNN, terkait bidang apa saja yang bisa ditingkatkan dalam upaya pengembangan kemampuan para penegak hukum yang ada di Indonesia.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian-penelitian terdahulu untuk menjadi acuan referensi, dimana dalam tinjauan literatur ini peneliti membagi menjadi 3 kategori pengelompokan tinjauan literatur, guna dapat memudahkan pembaca dalam memahami urutan referensi ini.

## 1. Kerja sama Antar Negara

### a. Skripsi dengan judul “Kerja sama Pemerintah Indonesia Dengan Malaysia Dalam Menangani Peredaran Narkoba” oleh Wisnu Aditya pada tahun 2017

Skripsi ini membahas tentang kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Malaysia dalam menanggulangi peredaran narkoba. Pada penelitian terdahulu menggunakan teori kerja sama internasional menurut pendapat Koesnadi Kartasasmita. Dimana pada penelitian terdahulu ini juga menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pemerintah Indonesia telah mengupayakan pemberantasan berupa peredaran dan penyelundupan yang berasal dari Malaysia. Penyelundupan yang terjadi yang berasal dari wilayah Malaysia sudah sering terjadi, hal ini bukan lain dikarenakan wilayah Indonesia dan Malaysia yang berdekatan mulai dari jalur laut maupun darat. Sehingga diperlukan sebuah upaya dimana ditekankan pada penindakan hukum yang berlaku. Hal ini guna untuk memutus rantai penyelundupan narkotika ke wilayah Indonesia melalui sindikat internasional. Akan tetapi upaya tersebut masih belum mencapai titik terang yang baik, masih terdapat hambatan yang membuat penanganan ini kurang optimal, yakni kurangnya patroli bersama oleh kedua negara atas jalur-jalur darat maupun laut di wilayah perbatasan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Wisnu Aditya, 2017, *Kerjasama Pemerintah Indonesia Dengan Malaysia Dalam Menangani Peredaran Narkoba*, (Skripsi, UPN “Veteran” Yogyakarta)

**b. Artikel dengan judul “Kerja sama Indonesia-Nigeria dalam Menangani Jaringan Perdagangan Narkoba Nigeria di Indonesia. Periode 2015-2017” oleh Yonathan Addo Putra Pradana pada tahun 2020**

Artikel ini membahas tentang kondisi Indonesia yang berada pada kondisi darurat narkoba. Kondisi ini disebabkan karena banyaknya penyelundupan narkoba yang masuk ke wilayah Indonesia. Dengan adanya kondisi yang mendesak ini, membuat negara Indonesia membutuhkan kerjasama, terutama dengan negara-negara yang bersangkutan dari kasus-kasus narkoba yang masuk ke Indonesia. Salah satunya yakni Nigeria. Nigeria adalah salah satu negara pemasok narkoba ke Indonesia terbilang cukup besar. Sehingga kerja sama bilateral diwujudkan di antara kedua negara, dan hal ini ditandai dengan penandatanganan MOU di Abuja pada Februari 2013. Tujuan dari penelitian ini adalah guna menganalisis bentuk kerja sama Nigeria dengan Indonesia. Dalam periode waktu 2015 hingga 2017. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Pada penelitian ini teori liberalisme digunakan untuk menjelaskan terkait pentingnya kerja sama yang dilakukan Nigeria dan Indonesia.<sup>13</sup>

**c. Skripsi dengan judul “Kerja sama Amerika Serikat – Meksiko Dalam Merida Initiative Untuk Menanggulangi Peredaran Narkoba” oleh Lorenzo Lamas pada tahun 2017**

---

<sup>13</sup> Yonathan Addo Putra Pradana, 2020, Kerjasama Indonesia-Nigeria dalam Menangani Jaringan Perdagangan Narkoba Nigeria di Indonesia Periode 2015-2017, *Journal of International Relations*, Volume 6, Nomor 3

Skripsi ini menjelaskan terkait kerja sama Amerika Serikat dan Meksiko dalam *Merida Initiative*. Kerja sama ini ditujukan dapat membantu pemberantasan dan pengamanan wilayah Meksiko dan juga negara-negara di kawasan Amerika Tengah. Dimana kerja sama ini dalam bentuk penggunaan militer. Pada penelitian ini memiliki tujuan penelitian untuk dapat mengetahui pola kerja sama Amerika Serikat dengan Meksiko dalam bentuk *Merida Initiative* guna menanggulangi peredaran narkotika. Metode penelitian pada penelitian terdahulu ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian tersebut guna dapat menggambarkan kerja sama di antara Amerika dan Meksiko melalui perjanjian *Merida Initiative*.<sup>14</sup>

**d. Artikel dengan judul “Kerja sama Indonesia Belanda Dalam Pencegahan Penyelundupan Narkotika” oleh Mirza Agung Wicaksono, Hermini Susiatiningsih dan Marten Hanuratahun 2017**

Artikel ini menjelaskan bentuk kerja sama di antara Belanda dan Indonesia dalam pencegahan penyelundupan narkotika dari para oknum internasional. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Guna dapat menggambarkan secara jelas bagaimana kerja sama yang dilakukan Indonesia dengan Belanda pada kasus narkotika tersebut. Penelitian ini juga menggunakan teori kerja sama untuk menjelaskan kerja sama bilateral yang terjadi di antara keduanya. Hasil dari penelitian ini sendiri adalah kerja sama

---

<sup>14</sup>Leorenzo Lamas, 2017, *Kerjasama Amerika Serikat – Meksiko Dalam Merida Initiative Untuk Menanggulangi Peredaran Narkotika*, (Skripsi, Universitas Pasundan)

antara Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan dalam hubungan JCLEC – CILC – Interpol, meskipun kerja sama ini telah berlangsung akan tetapi, kerja sama ini dinilai kurang efektif. Hal ini dikarenakan pada kerja sama yang terjadi di antara keduanya tidak ada perjanjian ekstradisi untuk menindak lanjuti para penjahat yang bersembunyi di wilayah Belanda.<sup>15</sup>

**e. Artikel dengan judul “Kerja sama Indonesia – Brasil Dalam Penanganan Perdagangan Narkotika Asal Brasil Di Indonesia Periode 2010-2015” oleh Didier Abihail pada tahun 2017**

Pada artikel ini membahas terkait kasus Rodrigo Gularte yang telah ditangkap pada tahun 2003 dan Reginaldo Bom Fim pada tahun 2012 di Indonesia karena telah menyelundupkan narkoba dari Brazil ke Indonesia. Tujuan penelitian ini membahas terkait kerja sama di antara Brasil dengan Indonesia terkait pemberantasan narkoba, dan juga pendukung dan hambatan yang terjadi dalam kerja sama ini. Alur pemikiran pada penjelasan penelitian ini adalah menjelaskan terkait prosedur kerja sama yang terjalin di antara kedua negara. Penelitian ini juga menggunakan dua teori yakni liberalisme dan implementasi kebijakan. Teori liberalisme berkaitan erat dalam pembahasannya terkait kerjasama, sehingga pada penelitian ini teori liberalisme digunakan untuk menjelaskan efektivitas kerja sama yang terjalin di antara Belanda dan Indonesia. Sedangkan teori implementasi kebijakan sendiri digunakan. Hasil dari penelitian ini adalah kerja sama di antara

---

<sup>15</sup> Mirza Agung Wicaksono, Hermeni Susiatiningsih dan Marten Hanuratahun 2017, Kerjasama Indonesia Belanda Dalam Pencegahan Penyelundupan Narkotika, Journal of International Relations, vol. 3, no. 4

Belanda-Indonesia terjalin secara formal dimana didasari atas dasar hukum yang dilaksanakan dalam bentuk dua kerjasama, pertama antar pemerintah, kedua antar lembaga kepolisian. Adapun pendukung dilakukan kerja sama yang terjalin di antara kedua negara ini yakni berangkat dari dua kasus yang disebutkan sebelumnya menunjukkan pentingnya kerja sama di antara kedua negara. Terkait hambatan sendiri, adanya penerapan hukuman mati di Indonesia yang menjadi terhambatnya pengumpulan informasi intelijen untuk pemberantasan narkotika.<sup>16</sup>

Dari kelima literatur terdahulu diatas menjelaskan tentang kerja sama yang dilakukan Indonesia dengan negara lain, dimana yang menjadi aktor dalam melakukan perjanjian kerja sama ini adalah pemerintah atau negara itu sendiri. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti, meskipun konteks kerja sama internasional dalam penelitian ini dilakukan oleh dua negara, akan tetapi yang menjadi aktor dalam kerja sama ini adalah badan pemerintah maupun non-pemerintah negara, yang memiliki perjanjian masing-masing per-instansi dengan mitranya dalam melakukan kerjasama. Sehingga dengan jelas terlihat, pada kelima penelitian di atas subjek penelitian ini dengan penelitian terdahulu dari kelima poin tersebut berbeda. Selain subjek penelitian isi kerja sama dari kelima studi literatur di atas lebih berfokus terhadap penindakan dan penegakan hukum, sedangkan pada penelitian peneliti, kerja sama yang terjalin di antara Indonesia dan Australia lebih berfokus pada *capacity building*. Alasan ini

---

<sup>16</sup> Didier Abihail, 2017, Kerjasama Indonesia – Brasil Dalam Penanganan Perdagangan Narkotika Asal Brasil Di Indonesia Periode 2010-2015, *Journal of International Relations*, Volume 3, Nomor 3.

menjadikan peneliti yakin dan dengan sungguh-sungguh dapat memastikan skripsi yang ditulis oleh peneliti belum dilakukan oleh peneliti lainnya, mengingat juga jarang yang meneliti aktivitas kerja sama dari negara Australia dan Indonesia.

## **2. Kerja sama Antar Instansi Pemerintah**

### **a. Skripsi dengan judul “Koordinasi Antara POLRI Dan BNN Dalam Melakukan Penyidikan Kasus Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di POLDA Sumatera Selatan Dan BNNP Sumatera Selatan)” oleh Britina Wati pada tahun 2018**

Pada Skripsi ini membahas tentang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Polri dan BNN. Pada penelitian ini ditekankan terkait bentuk koordinasi yang terjalin di antara BNN dan Polri. Koordinasi di antara aparat penegak hukum narkotika sangat penting untuk dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini lebih mengerucut yakni difokuskan pada bentuk koordinasi di antara Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan dan BNNP Sumatera Selatan dalam melakukan penyidikan narkotika. Hasil penelitian ini adalah koordinasi yang terjadi di dua instansi ini dilaksanakan dengan cara pemberitahuan secara tertulis kapan dimulainya penyidikan, pelaksanaan rehabilitasi dan juga terkait rencana penangkapan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Britina Wati, 2018, *Koordinasi Antara Polri Dan BNN Dalam Melakukan Penyidikan Kasus Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Polda Sumatera Selatan Dan BNNP Sumatera Selatan)*, (Skripsi, Universitas Sriwijaya)

**b. Artikel dengan judul “Kerja sama BNN Dan Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar” oleh Junaedi Junaedi, Ahmad Harakan, Elisa Indri Pratiwi Idris pada tahun 2019**

Artikel ini membahas tentang kerja sama BNN dan Kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Penelitian ini memiliki tujuan penelitian yakni untuk mengetahui bentuk kerja sama yang dilakukan di antara kedua instansi. Penelitian ini sendiri menggunakan metode dan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah kerja sama di antara kedua instansi dilakukan dalam bentuk pelaksanaan komunikasi atau disebut sebagai koordinasi di antara kedua instansi, dan juga penekanan terhadap tanggung jawab terkait tugas setiap badan instansi. Penghambat dari adanya kerja sama ini adalah kurangnya sumber daya manusia.<sup>18</sup>

Kedua literatur diatas menjelaskan terkait bagaimana koordinasi instansi pemerintah dalam menangani kejahatan narkoba yang ada di Indonesia, pada kedua literatur ini membahas tentang koordinasi antara BNN dan POLRI. Mengingat koordinasi antara lembaga yang menangani isu narkoba sangat diperlukan untuk mempercepat pemberantasan dan pemutusan jaringan narkoba. Terdapat hal yang membedakan antara penelitian terdahulu diatas dengan penelitian peneliti, yakni meskipun pada penelitian peneliti juga

---

<sup>18</sup> Junaedi Junaedi, Ahmad Harakan, Elisa Indri Pratiwi Idris, 2019, Kerjasama Bnn Dan Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5, No.1

membahas terkait koordinasi badan penanganan kasus narkoba akan tetapi tidak dalam negeri akan tetapi koordinasi yang terbangun yakni instansi dalam negeri Indonesia dengan instansi dalam negeri Australia. Sehingga membuat penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, dimana pada penelitian ini peneliti lebih berfokus bagaimana peran program-program kegiatan yang dilakukan di antara Indonesia-Australia dalam peningkatan kemampuan *capacity building* Indonesia dalam menangani kejahatan narkotika.

### **3. Aktor-Aktor Pemerintah Maupun Pemerintah Non-Kementrian Dalam Melawan *Drugs Trafficking***

#### **a. Artikel dengan judul “Peranan POLRI Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Boyolali (Studi Kasus Di Polres Boyolali)” oleh Tri Wahono pada tahun 2019**

Artikel ini membahas tentang bagaimana peranan Polri dalam pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Pada penelitian ini juga dibahas terkait bagaimana bahayanya narkotika. Terkait peranan Polri, peran kepolisian kini telah mulai dirasakan baik secara preventif maupun represif. Salah satu bentuk dari upaya preventif adalah dengan terjun langsung dalam melakukan penyidikan seperti, melakukan razia yang dilakukan secara teratur di wilayah dan waktu tertentu. Sedangkan bentuk upaya represifnya sendiri dengan cara melakukan pendekatan secara lunak

yakni melakukan pencegahan dengan mengadakan workshop ke sekolah-sekolah.<sup>19</sup>

**b. Artikel dengan judul “Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika” oleh Ida Bagus Trisnha Setiaawan, Ida Ayu Putu Widiati dan Diah Gayatri Sudibya pada tahun 2020**

Artikel ini membahas tentang peran BNN dalam melakukan pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika. Dimana pada pembahasannya juga disebutkan terkait bagaimana bahaya yang ditimbulkan dari pengkonsumsian narkotika. Tujuan dari penelitian ini yakni guna membahas upaya apa saja yang dilakukan BNN dalam memberantas narkotika, mengingat efek yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika begitu buruk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dalam pengkajiannya. Hasilnya sendiri adalah pencegahan dipilih BNN sebagai salah satu bentuk upaya yang diutamakan dalam kasus ini. Dimana pencegahannya dilakukan baik dari lingkungan pemerintahan, sekolah, masyarakat, organisasi dan keluarga, hambatan dari pengupayaan yang dilakukan BNN ini sendiri adalah pada bidang finansial, atau keuangan. Yakni biaya operasional yang

---

<sup>19</sup> Tri Wahono, 2019, Peranan Polri Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Boyolali (Studi Kasus Di Polres Boyolali), *Jurnal Bedah Hukum*, Vol.3, No.2

dibutuhkan BNN ternyata tidak cukup untuk melakukan penyidikan, selain itu faktor sarana dan prasarana juga menjadi hambatan dalam hal ini.<sup>20</sup>

**c. Artikel dengan judul “Peran Direktorat Jenderal Bea Cukai Dalam Menangani Penyelundupan Narkotika Jalur Laut Di Kepulauan Riau” oleh Rahel Kartika dan Parningotan Malau pada tahun 2021**

Artikel ini membahas terkait peranan DJBC dalam penanganan penyelundupan narkotika ke Indonesia yang terletak di Kepulauan Riau dan juga untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapinya. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan dan teori kebijakan hukum pidana. Guna menjelaskan sistem pengawasan laut yang dilakukan DJBC. Hasil dari penelitian ini sendiri adalah sistem pengawasan yang dilakukan DJBC memiliki fungsi strategi dalam upaya pencegahan ini, yakni dilakukan dengan cara penyusuran dan berkoordinasi dengan instansi yang memiliki wewenang lebih pada area kelautan.<sup>21</sup>

Pada ketiga tinjauan literatur diatas menjelaskan terkait 3 (tiga) aktor instansi pemerintah maupun non-pemerintah yang mempunyai peranan dalam menangani isu *drugs trafficking*. Dari ketiga penelitian diatas hanya menjelaskan peranan per instansi di dalam negeri. Sehingga pada penelitian peneliti menjelaskan lebih, selain dengan melakukan koordinasi dan program internal. Terdapat upaya lain yang dilakukan per instansi yakni dengan melakukan kerja

---

<sup>20</sup> Ida Bagus Trisnha Setiaawan, Ida Ayu Putu Widiati dan Diah Gayatri Sudibya, 2020, Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2, Nomor 3

<sup>21</sup> Rahel Kartika dan Parningotan Malau, 2021, Peran Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Penanggulangan Penyelundupan Narkotika Jalur Laut Di Kepulauan Riau, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 7 No. 1

sama internasional dengan Australia beserta dampaknya yang akan dibahas oleh peneliti pada penelitian ini.

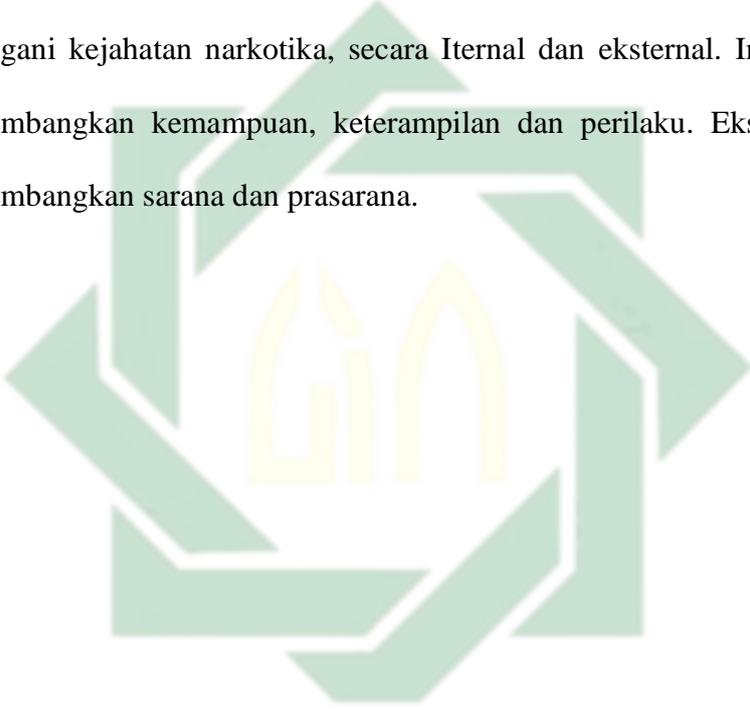
Penelitian terdahulu dengan Judul peran Australia terhadap *capacity building* Indonesia terhadap kejahatan narkoba, belum pernah dilakukan sebelumnya. Dari beberapa indikator yang telah dikelompokkan oleh peneliti, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya, kerja sama yang dilakukan untuk menangani kasus kejahatan narkoba tidak hanya dilakukan antara kerja sama *inter-state* atau antar negara, maupun kerja sama dalam negeri yang dilakukan oleh instansi-instansi yang mempunyai wewenang terkait penanganan narkoba, terlebih apabila kerjasamanya berorientasi terhadap penegakan hukum, atau operasi penindakan.

Akan tetapi kerja sama ini juga bisa dilakukan oleh instansi Pemerintah dalam negeri dengan badan instansi negara lain. Seperti penelitian yang dilakukan oleh peneliti, meskipun kerja sama yang terjalin di antara Indonesia dan Australia merujuk pada penanganan kejahatan narkoba. Akan tetapi pengeimplementasiannya tidak hanya dilakukan dengan melakukan operasi bersama, dalam menangani kejahatan narkoba dibutuhkan adanya kualitas SDM yang bagus, dengan adanya kualitas SDM yang dimiliki setiap badan penegak hukum akan membantu penanganan narkoba Indonesia semakin baik. Hal ini yang menjadi fokus penelitian peneliti, bagaimana peran Australia dalam mengembangkan kemampuan Indonesia dalam melakukan penegakan hukum. Sehingga, peneliti dapat menyimpulkan bahwa skripsi yang ditulis oleh peneliti

belum dilakukan oleh peneliti lainnya, mengingat juga jarang yang meneliti aktivitas kerja sama dari negara Australia dan Indonesia.

#### **F. Argumentasi Utama**

Peneliti berargumen bahwasanya Australia berperan dalam mengembangkan *capacity building* Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dalam menangani kejahatan narkoba, secara Internal dan eksternal. Internal dengan mengembangkan kemampuan, keterampilan dan perilaku. Eksternal dengan mengembangkan sarana dan prasarana.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB II**

### **LANDASAN KONSEPTUAL**

Pada bab ini akan membahas dan menjelaskan terkait konsep yang digunakan peneliti dalam menganalisis kasus ini. Konsep sendiri digunakan sebagai jembatan alat untuk menganalisis kasus. Pada penelitian ini menggunakan konsep peran yang digunakan untuk menjelaskan keterlibatan dalam peran yang dilakukan Australia dalam membantu Indonesia, konsep *capacity building* yang dikemukakan PBB. Konsep ini digunakan peneliti untuk mengukur seberapa berperan Australia dalam peningkatan *capacity building* badan penegak hukum Indonesia melalui beberapa agenda kerjasamanya di bidang narkotika.

#### **A. Peran**

Soekanto menjelaskan bahwasanya peran adalah aspek dinamis dalam status kedudukan, dimana apabila seseorang dapat melaksanakan hak dan tanggungjawabnya maka ia telah melakukan peranan dalam kehidupan atau aktivitasnya.<sup>22</sup> Sedangkan menurut Biddle dan Thomas bahwasanya peran adalah sebuah acuan atau patokan yang menjadikan seseorang memilih untuk melakukan sesuatu. Biddle dan Thomas membagi peran menjadi empat golongan di antaranya adalah:<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Soekanto, Soerjono. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal.213

<sup>23</sup> Biddle, B.J dan Thomas, E.J, 1966. Role Theory : Concept and Research. NewYork : Wiley.

1. Seseorang atau sekelompok yang ikut berkontribusi dalam interaksi sosial
2. Perilaku yang timbul diakibatkan dari adanya interaksi,
3. Kedudukan orang dalam berperilaku
4. Berkaitan antara individu dengan perilaku yang dilakukan.

Sedangkan menurut Andarmoyo sendiri peran adalah perilaku yang diharapkan muncul dari seseorang dalam situasi sosial tertentu guna memberikan keterlibatannya dalam situasi tersebut. Dimana hal tersebut guna untuk memenuhi harapan diri sendiri dan orang lain menyangkut peran itu sendiri.<sup>24</sup> Peran sendiri dipengaruhi akan keadaan lingkungan sosial baik dari dalam maupun dari luar.<sup>25</sup>

Sehingga berdasarkan beberapa pendapat yang ada, peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya peran adalah sebuah perilaku atau tindakan yang dilakukan seorang individu maupun kelompok guna melaksanakan tanggung jawabnya dimana hal tersebut dinantikan oleh orang sekitarnya.

## **B. Kejahatan Narkotika**

BNN (Badan Narkotika Nasional) menjelaskan kejahatan narkotika meliputi beberapa aspek, mulai dari penyalahgunaan narkotika, penyelundupan, perdagangan, pemroduksian narkotika secara ilegal.

### **1. Penyelundupan**

Menurut Hamzah penyelundupan adalah proses, cara, tindakan

---

<sup>24</sup> Andarmoyo, Sulisty. 2012. Keperawatan Keluarga Konsep Teori, Proses dan Praktik Keperawatan. Yogyakarta : Graha Ilmu. Hal. 4

<sup>25</sup> Mulyasa, 2003, Manajemen Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implikasi, Bandung, PT Remaja Rosda Karya. Hal.12

penyelundupan, dengan cara memasukan barang secara tidak sah untuk menghindari bea masuk atau untuk penyelundupan barang terlarang;<sup>26</sup> Dalam Webster's Ninth New Collegiate, kata *Smuggle* diartikan sebagai berikut : *To import or export secretly contrary to the law and especially without paying duties import or export something in violation of the customs law* “. Dimana jika dimaknakan suatu kegiatan yang melibatkan aktivitas mengimpor atau mengekspor barang secara gelap atau sembunyi-sembunyi, berlawanan atau tak sesuai dengan hukum dan dengan tujuan untuk menghindari Bea dan Cukai, dimana hal tersebut telah melanggar peraturan pabean, maka hal tersebut dimaknai sebagai penyelundupan.<sup>27</sup>

Baharuddin Lopa juga menjelaskan terkait penyelundupan dan menyelundupkan adalah mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan cara yang tidak mamatuhi peraturan yang telah ditetapkan dan berlaku di suatu wilayah dan tidak memenuhi atauran pebean.<sup>28</sup> Sehingga penyelundupan narkoba bisa dimaknai sebagai suatu aktivitas yang telah dilakukan oleh para oknum penyelundup dalam kegiatan *drugs trafficking*. Dimana bisa dikatakan berhasil diselundupkan apabila barang terlarang tersebut dapat masuk ke dalam wilayah negara lain, dan terhindar dari pengawasan badan pengawas, sampai ke tangan penadah. Dalam kegiatan penyelundupan ini, tidak sampai ada sebuah transaksi pembayaran atau jual beli, sehingga dapat disimpulkan

---

<sup>26</sup> Adjib, Hamzah. (1985). Pengantar Bermain Drama. Bandung: Rosda Karya.

<sup>27</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah Dan Pemecahan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1991 , hal.3

<sup>28</sup> Baharuddin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1990 , hal.27

sebagai suatu aktivitas memasukkan barang ke dalam suatu wilayah negara lain secara ilegal demi menghindari adanya bea masuk.<sup>29</sup> Dapat disimpulkan bahwasanya penyelundupan narkoba adalah suatu aktivitas yang melibatkan pemindahan narkoba dari satu negara ke negara lain atau bahkan satu negara ke negara lain. Dimana barang tersebut merupakan zat ilegal, atau jika itu adalah obat legal. Dimana tujuan pemindahan ini ditujukan untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang. Dimana jika sudah terjadi penjualan, bukan hanya pemindahan barang, maka hal tersebut bisa dikatakan sebagai perdagangan.

## 2. Perdagangan

Perdagangan narkotika adalah perdagangan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau secara gelap dimana aktivitasnya melibatkan adanya budidaya, manufaktur dan distributor yang patuh dan tunduk pada hukum illegal yang telah dibuat.<sup>30</sup> Perdagangan narkoba adalah perdagangan gelap yang dilakukan secara global, melibatkan penanaman, pembuatan, serta perdagangan zat-zat yang merupakan obat-obat terlarang menurut hukum. Pasar perdagangan gelap narkoba dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu kokain, opium dan heroin, *amphetamine-type stimulants* (ATS) dan marijuana.<sup>31</sup>

## 3. Peredaran

Aktivitas peredaran narkotika, meliputi aktivitas pendistribusian narkotika,

---

<sup>29</sup> NCA, 2016, *Drug trafficking*, diakses di <https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/what-we-do/crime-threats/drug-trafficking>

<sup>30</sup> United Nations office drugs and crime, terdapat di <https://www.unodc.org/unodc/en/drugs-trafficking/>.

<sup>31</sup> Ibid

dimana pada aktivitas ini telah melalui transaksi uang antara penjual dan pembeli. Dimana kegiatan ini meliputi penyaluran dan penyerahan narkotika baik dalam konteks perdagangan maupun bukan perdagangan. Dimana dilakukan dengan sengaja melanggar hukum tindak pidana narkotika yang telah ditentukan dalam negara.<sup>32</sup>

#### 4. Pemroduksian

Dalam Undang-Undang Narkotika dijelaskan bahwasanya pemroduksian narkotika adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengola, membuat dan menghasilkan narkotika secara langsung maupun secara tidak langsung melalui ekstraksi maupun non-ekstraksi dari sumber alami, kimia sintetis maupun gabungannya. Tidak hanya itu pemroduksian ini juga melibatkan aktivitas perubahan bentuk, pengemasan narkotika itu sendiri secara ilegal.<sup>33</sup>

Kejahatan narkotika sendiri tergolong sebagai kejahatan internasional atau kejahatan transnasional. Hal ini bukan lain dikarenakan kejahatan ini telah menjadi perhatian dan mengancam seluruh negara di dunia, selain itu dalam aktivitas pergerakan kejahatan ini melibatkan sindikat internasional dimana hal ini telah melibatkan lebih dari satu negara dalam pergerakannya.<sup>34</sup> Kejahatan narkotika ini telah merambah ke segala kalangan, mulai dari publik figur, petugas pemerintah, masyarakat awam dan juga kalangan remaja.

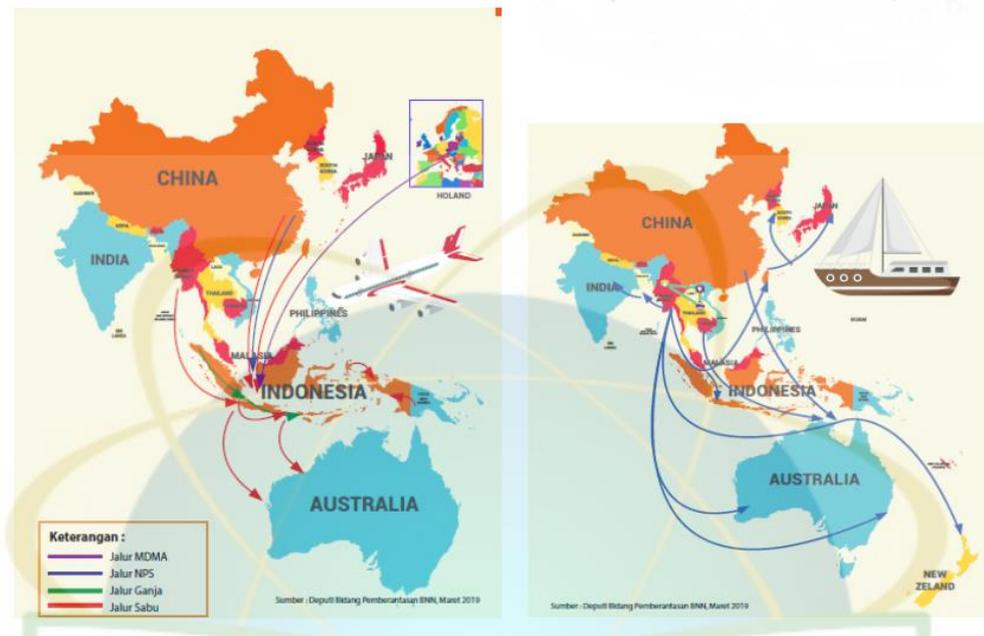
---

<sup>32</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Bab VI Peredaran pasal 35

<sup>33</sup> Ibid, Bab I ketentuan umum

<sup>34</sup> BNN, 2021, Narkoba dan sanksinya, <https://munakab.bnn.go.id/narkotika-sanksi-hukumnya/>

Gambar, 2.1 Peta Jalur Masuk Penyelundupan Narkotika ke Indonesia



Sumber : BNN, 2019, *Indonesia Drugs Report 2019*, Jakarta Timur<sup>35</sup>

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwasanya kondisi geografis Indonesia menjadikan negara ini, bisa menjadi negara transit maupun negara tujuan para sindikat internasional. Sedangkan pada negara Australia penyelundupan narkoba sering terjadi dari negara Asia dan Indonesia dijadikan negara transit menuju negara Australia. Sehingga menjadikan pentingnya kerja sama dengan Indonesia dimana memiliki posisi sentral yang mempunyai peranan besar di Asia dan menjadi pembatas masuknya ke Australia.

### C. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia atau BNN RI merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan

<sup>35</sup> BNN, 2019, *Indonesia Drugs Report 2019*, Jakarta Timur, hal. 59

dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden. BNN memiliki tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya. BNN sebagai sebuah lembaga forum juga memiliki tugas dan fungsinya sendiri yaitu, mengkoordinasikan instansi terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba serta mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba. BNN RI berkedudukan di daerah ibu kota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.<sup>36</sup>

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) memiliki Visi dan Misi. Visi dari BNN yakni “Menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Adiktif lainnya”. Sedangkan Misi dari BNN adalah “Bersama instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat, bangsa, dan negara melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Adiktif lainnya” .<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> BNN, Nd, Profil BNN, <https://bnn.go.id/>

<sup>37</sup> Bakesbangpol, nd, Badan Narkotika Nasional, <https://portal.kesbangpol.bandung.go.id/badan-narkotika-nasional-bnn/>

Dalam misi pemberantasan penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan penyidikan serta penyelidikan terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta prekursor narkoba. Selain strategi peningkatan pengendalian serta pengawasan, terdapat juga strategi lain yang dilakukan oleh BNN yang merupakan bagian dari tugas dan fungsi pokok dari BNN sendiri. Melalui strategi-strategi tersebut, BNN bersama masyarakat melaksanakan langkah-langkah seperti melaksanakan pencegahan primer, yaitu seperti mengadakan penyuluhan-penyuluhan mengenai bahaya narkoba, penerangan melalui informasi media cetak, televisi, maupun berbagai media online, serta melakukan pendidikan mengenai pengetahuan narkoba dan bahayanya. ” ”

BNN juga melakukan pencegahan sekunder yaitu seperti dengan mendeteksi dini bagi anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba, konseling serta melakukan bimbingan sosial. Program-program tersebut merupakan suatu upaya BNN dalam melaksanakan pencegahan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba (P4GN). Selain BNN terjun dalam memberantas penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba, BNN juga ikut serta mengajak masyarakat dalam turut ikut andil dalam membantu kinerja BNN dalam memberantas narkoba. Untuk memperkuat jaringan, BNN mengajak lembaga swadaya masyarakat, pemuda-pemuda, organisasi mahasiswa dan lain sebagainya untuk membantu

mensosialisasikan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaranya.<sup>38</sup>

Dengan menjadi Instansi pemerintahan dalam negeri yang mempunyai tanggung jawab penuh dalam penanganan kejahatan narkoba, menjadikan BNN menjalin kerja sama dengan negara-negara sekitar khususnya dengan negara tetangga, guna memberantas aksi kejahatan narkoba. Mengingat status dari kejahatan narkoba ini telah menjadi urgensi di seluruh dunia.

#### **D. Peningkatan Kapasitas (*Capacity Building*)**

*Capacity building* atau dapat disebut sebagai peningkatan kemampuan adalah proses pengembangan sebuah kemampuan yang dapat dipertahankan dari waktu ke waktu. Terdapat beberapa pendapat ilmunan dalam pendefinisian *capacity building* di antaranya adalah, Brown et al. menjelaskan *capacity building* adalah suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, kelompok, suatu organisasi atau sistem dengan tujuan untuk mencapai suatu pencapaian yang lebih baik dari sebelumnya.<sup>39</sup> Morison juga menjelaskan tidak berbeda dari sebelumnya bahwasanya dalam melakukan peningkatan kemampuan pada level apapun

---

<sup>38</sup> BNN Provinsi Kepulauan Riau, 2021, Peran Strategis BNN Dalam Menguatkan Kesatuan Bangsa Untuk Melawan Narkoba. Diakses melalui <https://kepri.bnn.go.id/peran-strategis-bnn-dalam-menguatkan-kesatuan-bangsa-untuk/>

<sup>39</sup> Brown, Lisanne, et. Al, 2001. Measuring Capacity Building, Carolina population Center, University of North Carolina, Chapel Hill. Hal. 8

itu, baik dari level individu, kelompok, harus dilakukan menyesuaikan kebutuhan dari masing-masing level.<sup>40</sup>

Menurut PBB sendiri peningkatan kapasitas harus di mulai dari dalam, maksudnya adalah dari para petugas itu sendiri, dengan baiknya kualitas yang dimiliki seorang individu, kelompok akan menentukan baiknya sebuah sistem yang sedang dijalankan.<sup>41</sup> Pada umumnya *capacity building* ini adalah suatu proses untuk membenahi kemampuan yang dinilai kurang dari individu, kelompok dan organisasi untuk mencapai tujuan bersama menjadi lebih baik. Proses ini dapat membantu sekelompok individu tersebut, dapat mengidentifikasi dan juga menyelesaikan permasalahan tersebut.<sup>42</sup>

Dalam kegiatan *capacity building* sendiri dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti memberikan bantuan, pelatihan kerja, bantuan teknik dan juga penguatan jaringan. Akan tetapi agenda kegiatan ini dapat menyesuaikan dengan bidang apa yang sedang dikembangkan.<sup>43</sup>

Sama halnya pada penelitian ini, dari beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam upaya peningkatan kemampuan Indonesia dalam penanganan kejahatan narkoba, dapat diimplementasikan sesuai dengan

---

<sup>40</sup> Grindle, M.S. 1997. *Getting Good Government Capacity Building In The Public Sector Of Developing Countries*, Boston, MA : Harvard Institute for International Development

<sup>41</sup> United Nations. 2011, *Capacity Building*, <https://www.un.org/en/academic-impact/capacity-building>

<sup>42</sup> National Council, Nd, *what capacity building?*, [https://www-councilofnonprofits-org.translate.google/tools-resources/what-capacity-building?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=sc](https://www-councilofnonprofits-org.translate.google/tools-resources/what-capacity-building?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc)

<sup>43</sup> M Digital, 2020, *pengertian capacity building dan contoh penerapannya*, <https://www.materidigital.com/pengertian-capacity-building-dan-contoh-penerapannya/>

urgensi yang ada sehingga dapat menggolongkan kegiatan mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu.

*Capacity building* dibagi menjadi tiga dimensi, Dimensi tersebut berkaitan dengan implementasi dari *capacity building* dan telah diidentifikasi, di antaranya:<sup>44</sup>

1. Tingkat Individu

Dimensi ini hanya berfokus pada peningkatan kebutuhan individu. Fokus hanya pada pengembangan sumber daya manusia yang permasalahannya bisa melalui langkah program pelatihan dan Pendidikan untuk mengembangkan kemampuan individu.

2. Tingkat Entitas

Pada dimensi ini aktor peran yang terlibat adalah pemerintah, operasi sektor swasta, organisasi informal seperti halnya organisasi yang berbasis komunitas ataupun sukarelawan.

3. Tingkat sistem/ sosial luas

Tingkatan tertinggi dalam dimensi di mana ruang lingkup pada tatanan internasional melibatkan seluruh negara dan masyarakat serta seluruh subkomponen yang terlibat. Dimensi pada tingkat sosial lebih luas mencakup bidang kebijakan, kerangka

---

<sup>44</sup> Enemark, S. 2003. Understanding the Concept of Capacity Building and the Nature of Land Administration Systems. FIG Working Week, 5.

hukum/peraturan, perspektif manajemen dan akuntabilitas dan sumber daya yang sudah tersedia.

Dalam melakukan kegiatan *capacity building* dapat dilakukan dalam beberapa aspek, meliputi:<sup>45</sup>

#### 1. Internal

Dalam kategori internal ini, pengembangan kemampuan dilakukan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam entitas itu sendiri. Seperti pengembangan kemampuan (*capability*), keterampilan (*skills*) dan Perilaku (*Behaviours*).

Kemampuan (*capability*) adalah kapasitas sumber daya manusia dalam melakukan suatu pekerjaan, terlebih dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Selain dalam menyelesaikan suatu permasalahan entitas juga harus mempunyai kemampuan dalam pengetahuan untuk mendukung penyelesaian permasalahan. Pengetahuan ini meliputi terkait topik permasalahan dan juga bahasa. Sehingga dalam poin kemampuan ini meliputi penyelesaian permasalahan dan pengetahuan.

Keterampilan (*skills*) kelompok suatu entitas ditekankan pada keterampilan menggunakan dan pemanfaatan teknologi dan juga keterampilan dalam kepemimpinan. Teknologi sangat menentukan dalam pengembangan keterampilan suatu kelompok. Hal ini dikarenakan pengembangan teknologi selalu mengalami perubahan

---

<sup>45</sup> Douglas Norton, Anastasia Alexaxi. et all, 2003, Evaluating Capacity Development, ISNAR (international service for National Agricultural research, Netherland <http://www.isnar.cgiar.org>

sehingga dibutuhkan adanya keterampilan khusus. Dalam kepemimpinan dibutuhkan keterampilan khusus terlebih akan manajemen pengambilan keputusan dan kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan.

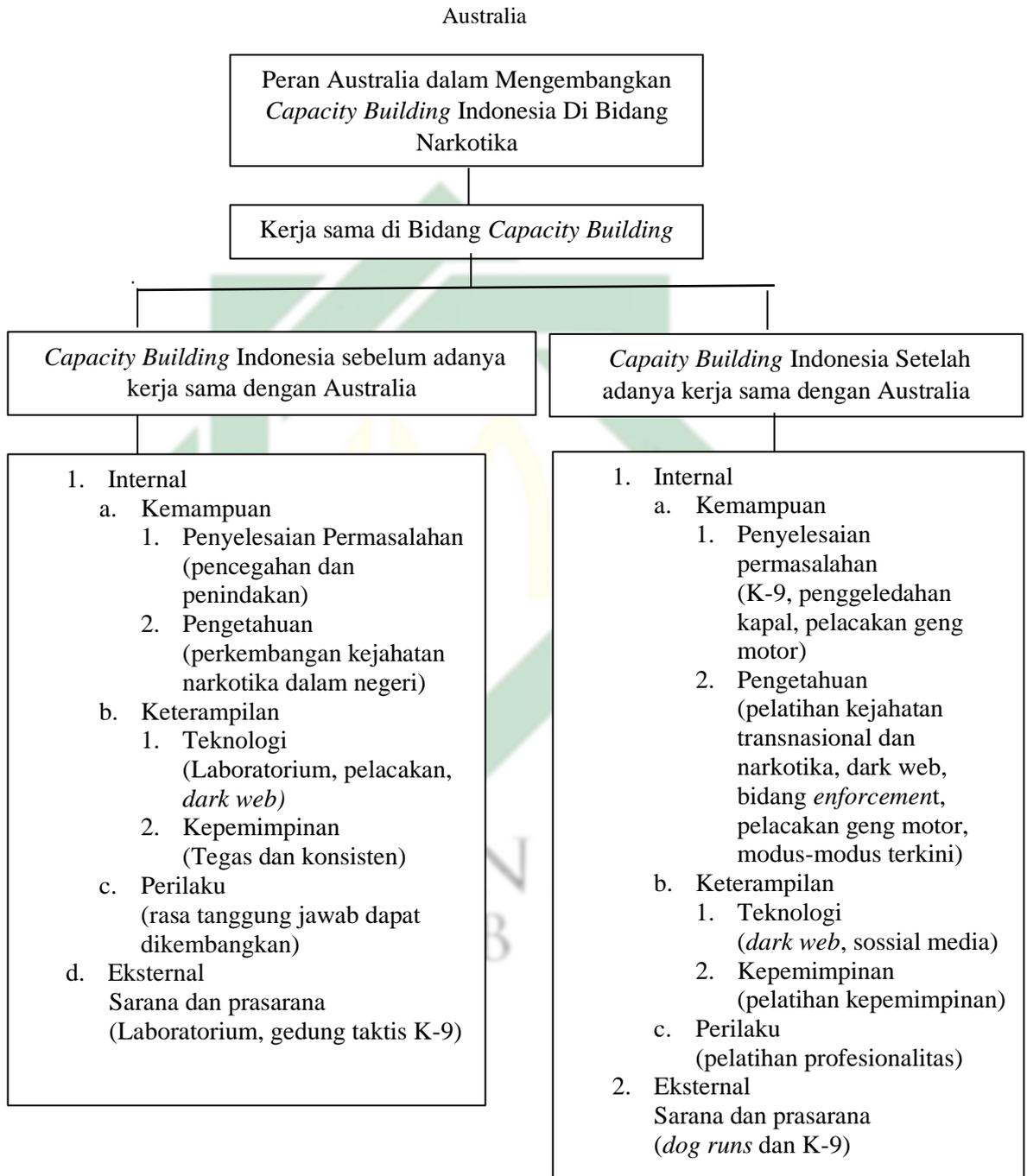
Perilaku (*Behaviours*) dalam kelompok atau entitas meliputi, cara berkomunikasi, kedisiplinan, professional, tanggungjawab. Dalam suatu instansi pemerintahan perilaku adalah hal yang menjadi sorotan utama dari kacamata masyarakat, perilaku juga akan menjadi bahan pertimbangan akan keberhasilan pengadaptasian instansi terhadap suatu permasalahan.

## 2. Eksternal

Kategori eksternal ini adalah hal pendukung untuk melakukan mempercepat proses kerja, seperti penambahan alat kerja pendukung, pembangunan lokasi tempat kerja, perbaikan fasilitas.

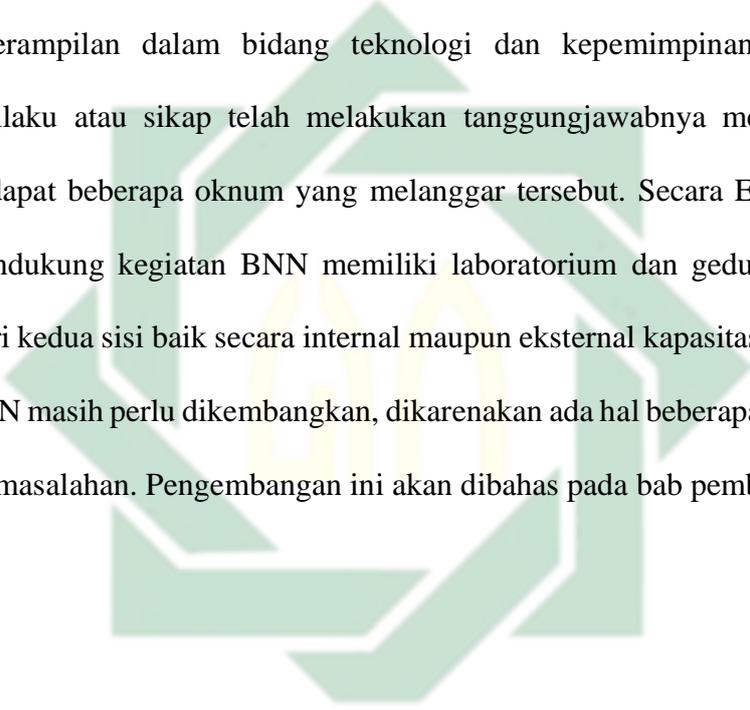
Kedua poin tersebut saling berkesinambungan dalam tujuan peningkatan kemampuan (*capacity building*). Dengan adanya pengembangan dari sisi secara internal dan eksternal yang memumpuni dan baik dalam menyelesaikan suatu permasalahan khususnya dalam menangani kejahatan narkoba, yang pada dasarnya membutuhkan kemampuan, keterampilan dan pengetahuan yang khusus, dan sarana prasarana pendukung yang baik. Akan dapat mengembangkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas terhadap penanganan sebuah permasalahan

Bagan 2.1, *Capacity Building* Indonesia sebelum dan Sesudah Adanya Kerja sama dengan



Berdasarkan penjelasan diatas, indikator *capacity building* terdapat dua aspek yakni secara internal dan eksternal. Internal meliputi kemampuan,

keterampilan dan sikap. Sedangkan pada eksternal meliputi sarana dan prasarana. Dari kedua sisi tersebut Indonesia memiliki kapasitas dari kedua indikator. Secara internal pada aspek kemampuan Indonesia khususnya BNN memiliki kemampuan penyelesaian permasalahan dan pengetahuan dalam menangani kejahatan narkoba. Pada aspek keterampilan memiliki keterampilan dalam bidang teknologi dan kepemimpinan. Pada aspek perilaku atau sikap telah melakukan tanggungjawabnya meskipun masih terdapat beberapa oknum yang melanggar tersebut. Secara Eksternal untuk mendukung kegiatan BNN memiliki laboratorium dan gedung taktis K-9. Dari kedua sisi baik secara internal maupun eksternal kapasitas yang dimiliki BNN masih perlu dikembangkan, dikarenakan ada hal beberapa yang menjadi permasalahan. Pengembangan ini akan dibahas pada bab pembahasan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Metode penelitian pada penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang membahas terkait peran Australia dalam mengembangkan *capacity building* yang ada di Indonesia. Metode penelitian kualitatif adalah salah satu metode yang difungsikan guna menggambarkan, mencari dan memahami permasalahan sosial atau kemanusiaan.<sup>46</sup> Sedangkan pada penelitian kejahatan narkoba termasuk ke dalam keduanya sehingga penggunaan pendekatan kualitatif dinilai pas pada penelitian yang digunakan oleh peneliti. Penggunaan metode deskriptif juga ditujukan peneliti dapat menjelaskan secara jelas bagaimana peran Australia dalam mengembangkan *capacity building* khususnya di bidang penanganan kejahatan narkoba yang ada di Indonesia secara rinci, dan runtut.

#### **B. Waktu dan Tempat Penelitian**

Peneliti memfokuskan penelitian setelah adanya kasus Bali Nine, dikarenakan setelah kejadian tersebut kerja sama di antara Indonesia dan Australia kini fokus pada pengembangan *capacity building* para badan penegak hukum Indonesia. Sedangkan penelitian terkait topik *countering drugs trafficking* ini dilakukan oleh peneliti mulai dari bulan September 2022 sampai

---

<sup>46</sup> Creswell W. John. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 12

Desember 2022 yang beragenda melakukan wawancara dengan BNN pusat dan DJBC Pusat dan BNN RI. Juga terdapat beberapa agenda yang disusun peneliti setelah melakukan wawancara.

### C. Level Analisa

Mochtar Mas'ood menjelaskan bahwasanya terdapat lima tingkatan analisis antara lain, Individu, Perilaku Kelompok, Negara-bangsa, Pengelompokan negara-negara dan Sistem Internasional.<sup>47</sup> Sehingga berdasarkan apa yang telah dijelaskan Mochtar Mas'ood pada tingkat analisis yang dilakukan oleh peneliti termasuk di dalam negara-bangsa. Dalam konteks hubungan internasional, dapat diketahui bahwa segala tindakan internasional pada dasarnya banyak didominasi oleh perilaku unit negara-bangsa. Begitupun pada penelitian ini, peneliti memilih level analisis negara bangsa dikarenakan, pada penelitian ini lebih berfokus pada perilaku atau tindakan yang dilakukan satu negara yakni Australia. Subjek penelitian ini adalah Pemerintah Australia yang diwakili oleh (*Australian Border Force*) ABF dan (*Australian Federal Police*) AFP. Meskipun terdapat dua negara yang terlibat dalam kerja sama ini akan tetapi, yang dilihat pada penelitian ini adalah dari sudut pandang Australia, terkait tindakan apa saja yang telah dilakukan dalam agenda peningkatan *capacity building* yang ada di Indonesia.

---

<sup>47</sup> Charles W. Kegley, Jr. dan Shannon I, 2011, Blanto, *World Politics: Trend and Transformation*. Boston, MA: Wadsworth Cengage Learning, 18-19 dalam, Umar Suryadi Bakry. 2017. *Dasar Dasar Hubungan Internasional Edisi Pertama*. Depok: Kencana, hlm. 222

## **D. Tahap Penelitian**

### **1. Tahap Persiapan dan Pendahuluan**

Pada tahap persiapan ini peneliti memulai dengan mengumpulkan beberapa fakta-fakta yang ada berdasarkan data lapangan dan juga data dari *website* instansi-instansi resmi dari instansi yakni BNN, terkait kerja sama apa saja yang telah dilakukan dalam kurun waktu setelah adanya kasus Bali Nine tersebut. Selanjutnya peneliti memulai menyusun data apa saja yang kurang dan perlu dilakukan wawancara lebih lanjut dengan BNN, dan juga peneliti memulai mengumpulkan jurnal dan skripsi lain dengan kesesuaian topik yang diteliti oleh peneliti sebagai penunjang data yang akan dianalisis.

### **2. Tahap Pelaksanaan**

Pada tahap ini peneliti memulai melaksanakan kegiatan penelitian melalui tahap wawancara yang dengan BNN di bulan Oktober tahun 2022. Selain itu peneliti juga melakukan kegiatan diskusi secara non-formal dengan perwakilan instansi terkait melalui media e-mail dan Whatsapp terkait topik pembahasan yang diteliti oleh peneliti.

### **3. Tahap Analisis Data**

Pada proses penganalisisan data ini, peneliti memulai membuat skema alur penulisan berdasarkan data-data yang telah peneliti peroleh dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, dan juga beberapa data yang didapat melalui media informasi digital seperti jurnal ilmiah, skripsi dan juga artikel yang berasal dari *website* resmi instansi yang membahas terkait beberapa agenda kerja sama apa saja yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu

penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pada tahap ini peneliti sudah mulai memilih dan memilah data mana yang diperlukan dan mana yang tidak diperlukan.

#### **4. Tahap Laporan**

Pada tahap ini peneliti mulai menulis hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti, baik dari wawancara tentang agenda kegiatan yang dilakukan antara Indonesia dan Australia dalam mengembangkan *capacity building*, dan juga terkait kerja sama apa saja yang telah dilakukan kedua instansi dalam bidang *capacity building* sebagai upaya penanganan kasus narkoba. Selain itu, peneliti juga memulai menulis hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti dari media informasi digital yang diperoleh peneliti dari *website* terkait peran Australia dalam mengembangkan *capacity building* Indonesia dalam menghadapi kejahatan narkoba. Penulis juga menulis teks wawancara yang telah dilakukan peneliti yang dikemas dalam bentuk teks penelitian berwujud Skripsi.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan oleh penulis yakni data yang diperoleh dari dua data, data primer dan data sekunder. Sumber data primer yang berasal dari hasil wawancara. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara informan dan peneliti. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang

terpercaya.<sup>48</sup> Pada penelitian ini yang menjadi narasumber sendiri adalah instansi-instansi yang terlibat kerja sama antara Indonesia dan Australia, seperti BNN dan Bea Cuka, yang membahas implementasi kerja sama yang dilakukan keduanya dengan ABF dan AFP, tentang agenda apa saja yang telah dilakukan dan direncanakan dalam mengembangkan *capacity building* Indonesia guna dapat menangani sindikat jaringan internasional. Pada data sekunder ini peneliti melakukan kajian dokumen secara online yang bersumber dari jurnal-jurnal, skripsi, *website* yang sesuai dengan topik penelitian peneliti.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman atau biasa dikenal dengan model interaktif. Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas.<sup>49</sup> Komponen dalam analisis data sebagai berikut:

##### **a. Reduksi Data**

Reduksi data adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyederhanakan data yang ditujukan untuk memudahkan peneliti dalam menarik sebuah kesimpulan. Pada bagian ini peneliti memilih data-data yang dibutuhkan oleh peneliti yang sesuai dengan topik dan judul yang dipilih oleh peneliti.

Seperti halnya data awal kerja sama Indonesia dan Australia dilakukan, akan

---

<sup>48</sup> Rika Suistia, 2018, <https://psikologi.fisip-unmul.ac.id/main/wp-content/uploads/2016/06/Wawancara.pdf>

<sup>49</sup> Robert Bogdan. *Qualitative Research for Education; An Introduction to Theory and Methods*. (London, 1982.) hlm. 157

tetapi disini peneliti menyederhanakan data tersebut sehingga bisa mudah untuk difahami. Dalam hal ini peneliti memilih data mana yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini, dengan cara meringkas data yang telah diperoleh peneliti dari wawancara maupun sumber informasi lainnya sesuai dengan bahasa pemahaman peneliti, selain itu dikarenakan data yang diperoleh dari wawancara masih bersifat tidak beraturan, peneliti menggolongkan data yang diperoleh sesuai dengan kategori yang telah peneliti tentukan, seperti, mana saja kegiatan yang ditujukan mengembangkan keterampilan, pengetahuan dan sikap. Sehingga dengan peneliti telah meringkas dan menggolongkan data yang telah peneliti peroleh, dapat memudahkan peneliti dalam menganalisis lebih lanjut penelitian ini.

#### b. Penyajian Data

Pada poin ini peneliti memulai menyusun kembali data-data yang telah ditemukan peneliti yakni data kerja sama yang dilakukan antara Indonesia dan Australia yang diwakili oleh beberapa instansi dalam negeri yang terkait, yakni kegiatan dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang masih belum terpublikasi. Dimana peneliti menyesuaikan data –data tersebut sesuai kategori yang telah ditentukan peneliti, sehingga data tersebut dapat mudah dipahami dan dimengerti. Data ini sendiri disajikan dalam bentuk teks naratif berupa deskriptif yang ditujukan untuk menjelaskan secara rinci dan lebih jelas sehingga pemahaman terhadap isi dari penelitian peneliti mudah di fahami.

### c. Verifikasi dan Kesimpulan

Setelah merudiksi data langkah yang dilakukan oleh peneliti selanjutnya adalah memverifikasi data itu sendiri yakni dengan cara mengecek kembali semua data-data yang sudah terkumpul dari awal hingga akhir, untuk mengetahui keabsahan datanya. Terkait menentukan keabsahan data ini peneliti mendengarkan kembali video rekaman dari wawancara yang telah dilakukan peneliti dan para narasumber dengan hasil wawancara yang telah ditulis oleh peneliti. Sehingga dengan melakukan pengecekan kembali data-data yang terkumpul peneliti dapat menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian serta memperluas penelitian terdahulu. Sehingga penyimpulan analisis ini akan ditulis nanti di bab lima.

### **G. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Dalam memastikan keabsahan data yang telah terkumpul, peneliti melakukan diskusi dengan pihak-pihak yang mempunyai pengetahuan lebih terkait topik yang diteliti oleh peneliti dan relevan dan sesuai dengan keahlian di antaranya, dosen pembimbing, pihak instansi BNN, dan teman sejawat. Selain itu dalam pengecekan keabsahan ini juga peneliti mendengarkan kembali video wawancara dan mencocokkan hasil penelitian yang telah ditulis oleh peneliti dengan video tersebut, selain itu peneliti juga mengirimkan kembali teks wawancara tersebut ke BNN untuk memastikan data yang tersebut benar.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pembahasan bab empat dijelaskan tingkat *capacity building* Indonesia dalam menangani kejahatan narkoba dan poin selanjutnya membahas terkait peran Australia dalam mengembangkan *capacity building* Indonesia dalam kejahatan narkoba melalui agenda kerja sama yang telah dilakukan.

#### **A. Kapasitas Kemampuan Indonesia dalam Bidang Narkoba Sebelum Adanya Pemfokusan Kerja sama di Bidang *Capacity Building* dengan Australia.**

Indonesia sendiri memiliki instansi Non-Kementerian yang didirikan dengan tujuan untuk menindaklanjuti khusus kejahatan narkoba, yakni Badan Narkoba Nasional (BNN) Republik Indonesia, BNN memiliki otoritas dan tanggung jawab penuh terkait penanganan kejahatan narkoba, sehingga dalam mencapai tanggung jawab yang di punya dan juga untuk melaksanakan tugasnya, BNN mempunyai target dalam bidang *capacity building* yang di punya dalam mendukung proses penindakan kejahatan narkoba. Target ini meliputi, memiliki tingkat kemampuan sumber daya manusia yang tinggi dalam menangani kejahatan narkoba baik dari sisi pencegahan, penindakan, dan lain sebagainya. Memiliki sarana dan prasarana yang cukup dan sesuai kebutuhan yang dibutuhkan. Memiliki strategi manajemen penanganan

kejahatan narkoba yang baik, dan juga dapat menjalin kerja sama yang baik dengan negara-negara lainnya dalam upaya penanganan kejahatan narkoba.<sup>50</sup>

Akan tetapi, pada pengimplementasian target yang telah dimiliki BNN, terdapat beberapa poin yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan kembali. Seperti pada di dalam aspek internal pada bidang keterampilan, sedikitnya sumber daya manusia yang dimiliki BNN dalam penguasaan teknologi dan manajemen kepemimpinan dalam penyelesaian kejahatan narkoba, sehingga menjadi tugas baru bagi BNN untuk dapat mengembangkan kapasitas kemampuan sumber daya manusia di bidang tersebut. Pada bidang kemampuan pengetahuan, kurangnya pemerataan penguasaan topik permasalahan dan bahasa. Pada bidang perilaku, masih terdapat petugas penegak hukum yang menyepelkan tanggung jawab yang dimiliki dalam menangani kejahatan narkoba. Berikut beberapa penjelasan secara lebih jelas, seberapa tingkat kemampuan Indonesia dalam menangani kejahatan narkoba sebelum adanya kerja sama di bidang *capacity building* dengan Australia. dua poin yang dapat menjadi agenda *capacity building* dalam dimensi entitas dan juga untuk menjelaskan tingkat kemampuan kapasitas, dimana hal ini juga dapat dilakukan dalam menganalisis tingkat kemampuan Indonesia terlebih BNN dalam menangani kejahatan narkotik. Dua poin tersebut meliputi:

1. Kapasitas BNN Secara Internal

Kapasitas secara internal meliputi kemampuan struktural kepegawaian atau dapat disebut kualitas sumber daya manusia dari entitas tersebut. Dalam

---

<sup>50</sup> BNN, nd, Profil BNN, Profil\_Badan\_Narkotika\_Nasional.pdf hal. 24-27

melihat kapasitas secara internal suatu instansi pemerintah perlu dilihat ke dalam tiga poin, yakni:

a. Kemampuan (*capability*)

Dalam aspek kemampuan meliputi kemampuan dalam penyelesaian permasalahan dan pengetahuan.

1. Kapasitas kemampuan BNN dalam menyelesaikan permasalahan

Dalam menyelesaikan permasalahannya BNN telah dilakukan dengan beberapa cara. Sebagai instansi yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap penanganan kejahatan narkoba telah dilakukan dalam beberapa hal, mulai dari kegiatan pencegahan dan penindakan. Dalam bidang pencegahan sendiri BNN telah melakukan penyuluhan terkait bahaya narkoba bagi segi kesehatan dan lain sebagainya. Penyuluhan ini dilakukan dalam bentuk seminar yang dilakukan di lingkungan masyarakat baik dari kalangan remaja maupun dewasa. Hal ini bukan lain penyalahgunaan narkoba telah melibatkan seluruh elemen di lingkungan masyarakat. Penyuluhan ini juga dilakukan di lingkungan sekolah maupun universitas.

BNN juga melakukan upaya pencegahannya dengan menyediakan konseling bagi para mantan pengguna narkoba serta keluarga di sekitarnya untuk menciptakan lingkungan sosial yang sehat. BNN juga melatih keterampilan kerja para mantan pengguna narkoba, selain dari sisi pihak mantan pengguna narkoba, BNN juga memberikan konseling terhadap lingkungan sekitar untuk kembali menerima para mantan

pengguna narkoba dan juga memberikan motivasi kepada mereka untuk tidak kembali ke hal-hal yang buruk.<sup>51</sup> Dalam segi pencegahan yang dilakukan Indonesia khususnya BNN telah melakukan dengan segala upaya dan kemampuannya. Pengupayaan yang telah dilakukan BNN melibatkan dan menjangkau kalangan masyarakat. Akan tetapi meskipun pencegahan telah dilakukan kesadaran masyarakat pun masih kurang akan bahayanya narkoba ini, sehingga kasus kejahatan narkoba di Indonesia masih terbilang cukup banyak dan memprihatinkan yang dikarenakan akan kurangnya kesadaran masyarakat.

Akan tetapi hal ini berbeda pada kapasitas keterampilan dalam upaya penindakan yang dimiliki Indonesia, dalam melakukan penindakan dan pengejaran para oknum narkoba, dibutuhkan beberapa keterampilan. Salah satunya adalah keterampilan K-9 atau anjing pelacak di bidang narkoba. Dalam kapasitas keterampilan di bidang ini Indonesia masih belum begitu maksimal dalam melatih anjing pelacak yang dimiliki, tidak hanya dalam segi melatih. Setiap badan instansi penegak hukum pun masih belum merata atas kepemilikan K-9, hanya Bea Cukai yang mempunyai K-9. Mengingat K-9 sangat berpengaruh terhadap aktivitas penindakan dan pengejaran para oknum penjahat, dimana melalui kemampuan pendeteksiannya, K-9 digunakan untuk menargetkan, membongkar, mengganggu, mendeteksi pergerakan dari narkoba yang sedang

---

<sup>51</sup> BNN, 2021, Upaya Sindikat Narkoba dan Upaya menghindari Narkoba, <https://sumsel.bnn.go.id/upaya-sindikat-narkoba-upaya-menghindari-narkoba/#:~:text=Melakukan%20berbagai%20kegiatan%20positif%2C%20seperti,Selain%20cara%20tersebut.>

ditargetkan.<sup>52</sup> Hal ini dengan adanya kekurangan dan kelemahan penindakan yang dilakukan BNN bisa dikembangkan dan ditingkatkan kembali.

## 2. Kapasitas Kemampuan BNN terhadap Pengetahuan

Pengetahuan didefinisikan tidak hanya pengetahuan secara umum terkait permasalahan atau pengetahuan secara akademis terkait permasalahan. Akan tetapi pengetahuan dalam hal ini adalah pengetahuan mengenai secara khusus topik atau permasalahan yang ingin diselesaikan dimana pengetahuan ini yang dimaksud ini adalah pengetahuan yang masih belum dimiliki individu pada umumnya, selain terkait topik permasalahan. Pengetahuan ini juga meliputi pengetahuan bahasa. Kemampuan Bahasa sangat penting dimiliki dalam menangani kejahatan narkoba, mengingat kejahatan ini tergolong dalam kejahatan transnasional yang mana melibatkan negara-negara lain. Sehingga dibutuhkan kemampuan bahasa.

Dalam kemampuan BNN terkait topik permasalahan, para aparat penegak hukum khususnya petugas BNN yang menangani kejahatan narkoba, tentunya telah mengetahui secara umum dan akademis terkait permasalahan narkoba. Seperti, pengetahuan di bidang perkembangan kasus kejahatan narkoba, dikarenakan kejahatan narkoba tergolong ke

---

<sup>52</sup> Handoyo, P., & Irawati, I. (2016). 40 Tahun "Perang Melawan Narkoba": Pengelolaan Narkoba oleh Negara, Perang Bukan Solusi. *Jurnal Peradilan Indonesia*, 5(1), 34. [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8PHZxozjAhVC6Y8KHR0ZCV8QFjAAe\\_gQIARAC&url=http%3A%2F%2Fmappifhui.org%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2017%2F03%2FTerpong-Volume-5-Agustus2016-Januari-2017.pdf&usg=AOvVaw](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8PHZxozjAhVC6Y8KHR0ZCV8QFjAAe_gQIARAC&url=http%3A%2F%2Fmappifhui.org%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2017%2F03%2FTerpong-Volume-5-Agustus2016-Januari-2017.pdf&usg=AOvVaw)

dalam kejahatan transnasional dimana kejahatan ini melibatkan negara-negara lainnya, sehingga BNN pun dituntut untuk mengetahui perkembangan kejahatan narkoba secara internasional.<sup>53</sup> Akan tetapi dalam pengetahuan perkembangan secara Internasional terlebih pengetahuan secara khusus terkait perkembangan kasus dan lain sebagainya di negara-negara lain tentu saja diperlukan adanya sinergi dengan negara lain. Meskipun adanya sinergi yang kuat telah dilakukan di antara para aparat badan penegak hukum Indonesia, hal ini masih dinilai kurang dikarenakan hanya dapat mengetahui atau memahami perkembangan di dalam negeri. Sehingga menjadikan adanya keterbatasan pengetahuan para aparat penegak hukum terkait perkembangan narkoba di dunia internasional. Tingkat pengetahuan akan mempengaruhi bagaimana penanganan narkoba di dalam negeri, baik dari segi pengidentifikasian dan lain sebagainya.<sup>54</sup>

Pengetahuan di bidang bahasa terutama pada pengetahuan bahasa Inggris dinilai sangat penting. Hal ini dikarenakan status kejahatan narkoba ini tergolong kejahatan transnasional sehingga melibatkan negara lain dalam penanganannya. Dalam penanganan ini juga akan melibatkan interaksi dengan negara lain, dan penggunaan bahasa yang digunakan untuk melakukan interaksi ini adalah bahasa internasional,

---

<sup>53</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional, <http://www.bphn.go.id/data/documents/10pr023.pdf>

<sup>54</sup> Bea Cukai, <https://e-perpus.beacukaijuanda.net/sites/default/files/2022-04/WARTA%20BEA%20CUKAI%20JUNI%202021.pdf>

yakni Bahasa Inggris.<sup>55</sup> Kemampuan berbahasa yang dimiliki Indonesia masih belum merata, berdasarkan pernyataan Bu Rika Motota untuk pengetahuan di bidang Bahasa Inggris ini masih belum merata.<sup>56</sup> Hal ini bisa dilihat pada kasus Bali Nine, dengan adanya kesalahan penerjemahan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris yang menjadikan pemaknaan yang berbeda, menunjukkan kemampuan berbahasa para aparat penegak hukum dapat dikembangkan kembali. Kesalahan penerjemahan mempengaruhi jalannya persidangan yang menjadikan adanya penundaan sidang di tahun 2010 yang lalu. Hal ini menjadi suatu pukulan yang keras terhadap kemampuan berbahasa aparat penegak hukum.<sup>57</sup> Dengan melihat kasus yang telah terjadi dapat difahami pentingnya penguasaan bahasa internasional yakni Bahasa Inggris dalam kemampuan penyelidikan kasus narkoba.

Kejahatan narkoba tergolong dalam kejahatan transnasional yang melibatkan beberapa negara di dalamnya. Dimana aktor yang terlibat dalam kejahatan dan menangani kejahatan narkoba ini juga besar dari belahan negara yang ada di dunia. Tentunya sebagai aparat penegak hukum harus mempunyai strategi dalam menghadapi kejahatan ini. Salah satunya yakni penguatan di dalam aspek *tracing* dengan keilmuan intelijen

---

<sup>55</sup> Putriani Sholihatun Nisa, 2022, Petugas Bea Cukai Indonesia sub-bagian Kerjasama Internasional Indonesia-Australia, wawancara DJBC

<sup>56</sup> Rika, 2022, Petugas BNN RI sub-bagian kerjasama internasional Indonesia-Australia, Wawancara BNN

<sup>57</sup> Detiknews, 2010, Salah Terjemahan Sidang Kasus Bali Nine Ditunda  
<https://news.detik.com/berita/d-1352967/salah-terjemahan-sidang-kasus-narkoba-anggota-bali-nine-ditunda->

hal yang sangat dibutuhkan dalam poin tersebut yakni penguasaan bahasa internasional yakni Bahasa Inggris.<sup>58</sup> Sehingga melalui penjelasan terkait kurangnya kemampuan para aparat penegak hukum narkoba terkait penguasaan Bahasa Inggris, dan juga terkait seberapa pentingnya penguasaan bahasa internasional ini, menjadikan Indonesia harus mengembangkan pengetahuan bahasa aparat penegak hukumnya.

b. Keterampilan (*skills*)

Keterampilan pada poin ini meliputi keterampilan pada bidang teknologi dan keterampilan dalam kepemimpinan.

1. Keterampilan BNN dalam Teknologi

Keterampilan di bidang teknologi, meliputi terkait kemampuan suatu individu atau kelompok dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi dalam memecahkan suatu permasalahan. Dengan ini jika dilihat dalam definisi tersebut dapat disimpulkan terkait bagaimana keterampilan BNN dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi sebagai alat untuk menangani kejahatan narkoba. Penguasaan keterampilan di bidang teknologi digunakan untuk mengimbangi kemampuan para sindikat narkoba, hal ini bukan lain dikarenakan teknologi digunakan atau dimanfaatkan oleh para sindikat untuk melancarkan kejahatan yang dilakukan mereka yakni guna menyembunyikan, menyamarkan narkoba di dalam barang, sebagai alat transaksi perdagangan, baik dari segi metode pembayaran atau tempat

---

<sup>58</sup> Amaritasari, I. P. (2017). Keamanan Nasional dalam Konteks Isu-isu Global Kontemporer: Sebuah Tinjauan Hubungan Internasional. *Jurnal Keamanan Nasional*, 3(1), 109–132. <https://doi.org/10.31599/jkn.v3i1.19> hal. 6

menjual jenis-jenis narkoba. Sehingga penguasaan di bidang teknologi harus dimiliki oleh BNN, terlebih BNN sebagai instansi yang mempunyai tanggung jawab penuh akan penanganan kejahatan narkoba.

Dalam pengimplementasian pemanfaatan teknologi sebagai salah satu bentuk cara dalam menangani kejahatan narkoba, BNN mendirikan pusat laboratorium, kemampuan laboratorium yang dimiliki BNN, digunakan untuk mengidentifikasi jenis-jenis narkoba, dan juga bertugas untuk mencegah dan mengidentifikasi adanya kemungkinan pengembangan jenis narkoba baru, hal ini sangat membantu deputi pemberantasan yang ada di BNN untuk melakukan pengidentifikasian dan pencegahan terhadap narkoba yang telah diidentifikasi pusat laboratorium BNN.<sup>59</sup> Selain pada kemampuan laboratorium, BNN juga menggunakan teknologi untuk melakukan upaya *mapping* atau pemetaan para sindikat narkoba, pemetaan ini menggunakan pemanfaatan adanya internet untuk melacak gerak gerak sindikat narkoba.<sup>60</sup>

BNN juga berusaha untuk mengembangkan kemampuannya dengan cara melatih kemampuannya pada analisis *dark web*. Sebelumnya, kemunculan *dark web* di tahun 2002 sebagai situs atau *website* anonim yang menyediakan layanan ilegal menjadikan kekhawatiran bagi Indonesia dan juga negara lainnya, seiring berjalannya waktu pada situs *dark web* ini juga

---

<sup>59</sup> BNN,nd, Laporan Laboratorium BNN, [https://laboratorium.bnn.go.id/asset/ppid/LKIP\\_.pdf](https://laboratorium.bnn.go.id/asset/ppid/LKIP_.pdf)

<sup>60</sup> Fathiyah Wardah, 2012, Indonesia di duga jadi sasaran transaksi narkoba online, <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-diduga-jadi-sasaran-transaksi-narkoba-online--1143476876/106349.html>

menyediakan transaksi anonim jual beli narkoba. Pada tahun 2013 di situs *dark web* muncul sebuah *market place* bernama dream market yang memang menyediakan jasa jual beli narkoba. Akan tetapi pada tahun-tahun awal kemunculan modus baru ini, Indonesia khususnya BNN masih memiliki keterbatasan akan kemampuan dalam penganalisisan di bidang ini, sehingga pada penanganan kejahatan narkoba di bidang ini sebelum melakukan kerja sama dengan Australia, Indonesia dibantu Amerika Serikat dalam penindakan atau pelacakan kejahatan narkoba melalui *dark web*.<sup>61</sup> Kemampuan dalam penganalisisan data terkait *dark web* melibatkan metode *tracing way* yang mana pada metode ini memerlukan keterampilan yang khusus. Akan tetapi, terdapat beberapa hambatan dalam keterampilan di bidang ini yakni jumlah sumber daya manusia yang dapat menganalisis atau pelacakan terbilang sedikit dan juga sarana dan prasarana yang kurang memadai menjadikan hambatan dalam penganalisisan di dalam salah satu situs tersebut.<sup>62</sup>

Hal ini senada dengan pernyataan dari Bu Farranthi Shavitri dan Bu Rika Motota selaku petugas BNN sub-bagian kerja sama internasional Indonesia-Australia, kemampuan para penegak hukum di bidang penguasaan teknologi masih kurang, di tahun 2005 sampai 2015 keterampilan ini masih belum merata di lingkungan para bagian analisis

---

<sup>61</sup>Liputan6, 2013, pengedar narkoba di dark web terancam 20 tahun penjara  
<https://www.liputan6.com/teknoread/3669111/pengedar-narkoba-di-dark-web-terancam-20-tahun-penjara>

<sup>62</sup> BNN, 2021, Darknet ruang kejahatan upaya memerangi narkoba bijak,  
<https://ntb.bnn.go.id/darknet-ruang-kejahatan-upaya-memerangi-narkoba-bijak/>

kejahatan atau bagian intelijen, baik di bidang pelacakan maupun pengidentifikasian, hal ini bukan lain akan adanya kekurangan sumber daya manusia yang dapat menguasai perkembangan teknologi baik dari segi pengidentifikasian maupun pelacakan yang menggunakan teknologi sebagai alatnya.<sup>63</sup>

Dengan adanya kekurangan dan hambatan pada peningkatan keterampilan di bidang ini, membuat Indonesia harus mengembangkan keterampilan BNN dalam penguasaan pada metode ini, mengingat penggunaan dan pemanfaatan perkembangan teknologi dari waktu waktu selalu dimanfaatkan oleh para sindikat narkoba.

## 2. Keterampilan BNN dalam Kepemimpinan

Dalam kepemimpinan BNN sendiri pada kasus Bali Nine menunjukkan identitas BNN yang akan tegas dan konsisten terhadap keputusan yang telah diambil, meskipun BNN terbilang instansi yang baru awal beroperasi pada kasus Bali Nine, mengingat BNN berdiri di tahun 2002 dan kasus Bali nine didapati di tahun 2005 selisih 3 tahun dari awal dibentuknya instansi ini, meskipun demikian dengan adanya keputusan dari pemimpin BNN dalam melakukan sinergi untuk menindaklanjuti kasus ini dengan badan kepolisian membuat permasalahan ini dapat diselesaikan dengan tuntas.<sup>64</sup> Pada sistem kepemimpinan BNN juga dapat

---

<sup>63</sup> Rika Motota dan Farranthi Shavitri petugas BNN sub-bagian kerjasama internasional Indonesia-Australia, 2022, wawancara

<sup>64</sup> Dewi Rusiana, Sejarah Bali Nine, diakses dalam <https://elshinta.com/news/2297/0000/00/00/sejarah-bali-nine>

dilihat sikap tegas yang ditunjukkan untuk mendukung hukuman mati terhadap dua terpidana, dengan harapan untuk menjadikan suatu ancaman terhadap sindikat lain dan juga dapat menurunkan angka kejahatan narkoba. Dukungan yang diberikan ini juga memiliki dasar yakni terhadap hukum yang berlaku di Indonesia terkait hukuman mati untuk kejahatan narkoba.<sup>65</sup>

Kepemimpinan yang ditunjukkan ini menunjukkan, adanya konsistensi terhadap keputusan yang telah diambil, dengan konsistennya ini menunjukkan kualitas penegakan hukum yang ada di Indonesia. Hal ini dibuktikan ditengah adanya kasus Bali Nine, Indonesia mendapatkan berbagai kecaman dunia dan juga protes dari Australia sampai menyebabkan Australia menarik Duta Besar Australia dari Indonesia sebagai bentuk protes dan rasa kecewa Australia terhadap hukuman mati yang diterapkan Indonesia. Meski demikian Indonesia dengan keteguhan dan kepatuhannya terhadap hukum yang berlaku di negaranya, tetap dengan gigihnya menjatuhkan hukuman eksekusi mati terhadap dua oknum dalam kasus Bali Nine, konsistensi ini menjadi bukti bahwa Indonesia tidak mudah goyah dalam menindak kasus narkoba.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Kompas, 2015, BNN dukung dua terpidana kasus bali nine segera dihukum mati, <https://regional.kompas.com/read/2015/01/21/12584611/BNN.Dukung.Dua.Terpidana.Bali.Nine.Segera.Dihukum.Mati>

<sup>66</sup> Alfeini, Yulia. "Kegagalan Diplomasi Pemerintah Australia Dalam Pembebasan Terpidana Hukuman Mati Kasus Bali Nine Di Indonesia". *Journal of International Relations*, Vol. 3 (2017), hal.19-29.

c. Perilaku (*Behaviour*)

Sikap atau perilaku dinilai sebagai cerminan dari kualitas dari entitas itu sendiri. Dalam instansi pemerintahan perilaku dinilai sangat penting terutama dalam hal tanggung jawab. Dalam konteks pelaksanaan tanggung jawab yang dipunya, terdapat beberapa oknum anggota BNN yang masih menyalahgunakan tanggung jawab yang dipunya. Hal ini dibuktikan dengan adanya dua oknum aparat penegak hukum anggota BNN yang menjual barang bukti narkoba, bahkan sampai memakai barang terlarang tersebut.<sup>67</sup> Dengan adanya penyalahgunaan tanggung jawab ini menjadikan turunnya kepercayaan terhadap BNN dalam menangani kejahatan narkoba oleh masyarakat. Lain hal itu, juga dapat membuat para sindikat dan pengguna narkoba menyepelekan akan penegakan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini dapat memicu munculnya sebuah asumsi yang salah terhadap petugas penegak hukum, apabila aparat dapat melanggar hukum apalagi masyarakat, tentu saja dapat melanggar hukum juga. Seorang petugas adalah tolak ukur yang dapat dilihat masyarakat, sehingga hal ini yang menjadikan pentingnya akan profesionalitas.

Ketiga indikator pada poin ini mulai dari kemampuan, keterampilan, sikap. Sangat mempengaruhi akan kapasitas kemampuan atau *capacity building* dari sisi internal, dengan adanya kekurangan yang

---

<sup>67</sup>CNN, dua pegawai BNN diduga jual barang bukti narkoba  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141018183244-32-440794/dua-pegawai-bnn-diduga-jual-barang-bukti-narkoba>

dimiliki BNN pada poin-poin ini menandakan perlu nya diadakan *capacity building* secara lebih baik untuk mengembangkan

## 2. Kapasitas BNN Secara Eksternal

Kapasitas Eksternal meliputi sarana dan Prasarana, dalam mendukung kinerja yang optimal dalam menangani kejahatan narkoba. BNN membangun beberapa sarana dan prasana untuk menunjang hal tersebut. Seperti Laboratorium dan juga gedung taktis K-9. Laboratorium yang didirikan BNN memiliki beberapa fungsi, mulai dari untuk mengidentifikasi jenis-jenis narkoba yang ada di Indonesia, mengidentifikasi akan adanya kemungkinan munculnya jenis-jenis narkoba baru.<sup>68</sup> Laboratorium ini sendiri masuk ke dalam sarana dikarenakan Laboratorium digunakan sebagai alat langsung untuk membantu menangani kejahatan narkoba. Selain Laboratorium BNN juga mendirikan gedung taktis untuk K-9. Dalam hal ini BNN masih memiliki kendala akan sarana satu ini. BNN memiliki keterbatasan dana dalam mendirikan *dog runs* untuk K-9 BNN. Selain adanya kekurangan dari segi sarana BNN juga memiliki kekurangan akan K-9 sendiri. Jumlah K-9 yang dimiliki BNN masih relatif sedikit dikarenakan adanya kekurangan dalam kemampuan *breeding* yang dimiliki BNN.<sup>69</sup>

Penjelasan diatas meliputi penjelasan terkiat kapasitas yang dimiliki BNN baik secara internal maupun eksternal. Dari kedua aspek tersebut BNN masih memiliki beberapa hal yang dapat dikembangkan. Pengembangan kapasitas BNN

---

<sup>68</sup>BNN, nd, pusat laboratorium BNN, diakses di <https://laboratorium.bnn.go.id/>pada tanggal 04 Januari 2023

<sup>69</sup> Iqbal Muhtarom, 2021, pasukan k-9 punya gedung baru, <https://metro.tempo.co/read/1651627/pasukan-k-9-punya-gedung-baru-fadil-imran-apresiasi-kinerja-anjing-pelacak>

tersebut dapat dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan negara lain salah satunya yakni Australia.

## **B. Peran Australia Mengembangkan *Capacity Building* Indonesia dalam Menangani Kejahatan Narkotika.**

Australia memiliki *capacity building* yang lebih maju dari pada Indonesia, dimulai dari pemakaian teknologi, metode kurikulum dalam pelacakan, keterampilan dalam penyelesaian permasalahan dan lain sebagainya.<sup>70</sup> Dengan ini menjadikan Indonesia tertarik untuk melakukan kerja sama di bidang *capacity building*. Hal ini dilakukan untuk mencapai target-target yang dimiliki Indonesia dalam tingkat kapasitas kemampuan menangani kejahatan narkotika, sesuai dengan penjelasan di bab sebelumnya. Berdasarkan tingkat kemampuan yang dimiliki Indonesia, Australia melalui *ABF* dan *AFP* memberikan sejumlah pelatihan yang ditujukan untuk entitas BNN RI meskipun disalurkan melalui individu-individu dalam insntasi tersebut.

Pelatihan-pelatihan tersebut meliputi beberapa kategori, di antaranya; di bidang keterampilan dilakukan dengan melakukan pelatihan-pelatihan teknologi dan kepemimpinan. Bidang kemampuan, dengan melakukan pelatihan dari segi kemampuan dalam penyelesaian permasalahan dan pemahaman terkait permasalahan. Pada bidang perilaku dengan melakukan pelatihan profesionalitas, yang masih menjadi permasalahan di Indonesia. Dari sisi Eksternal Australia memberikan hibah terhadap BNN untuk mendukung sarana dan prasarana BNN.

---

<sup>70</sup> Australian Strategic Policy Institute. Australia's Illicit Drug Problem is Getting Worse. Terdapat di <https://www.aspistrategist.org.au/australias-illicit-drugproblem-is-getting-worse/>

Berikut beberapa peran Australia melalui *ABF* dan *AFP* memberikan sejumlah pelatihan sebagai upaya membantu *capacity building* Indonesia melalui BNN dalam menangani kejahatan narkoba melalui tiga kategori yang dikemukakan oleh Enemark, di antaranya.

### **1. Peran AFP Mengembangkan *Capacity Building* BNN dalam Menangani Kejahatan Narkoba.**

*AFP* atau *Australian Federal Police* adalah instansi kepolisian negara Australia yang mempunyai tanggung jawab untuk menangani kejahatan transnasional, salah satunya adalah kejahatan narkoba. *AFP* sendiri dalam membantu mengembangkan *capacity building* BNN untuk menangani kejahatan narkoba, melakukan beberapa pelatihan yakni di secara Internal dan Eksternal. Meliputi :

#### a. Upaya AFP Mengembangkan Kapasitas BNN Secara Internal

Pengembangan kapasitas dari sisi internal meliputi pengembangan sumber daya manusia atau berfokus pada petugas BNN. Dalam mengembangkan kapasitas BNN secara Internal, *AFP* memberikan beberapa pelatihan terhadap BNN mulai dari pengembangan kemampuan, keterampilan dan juga perilaku.

##### 1. Pelatihan Pada Aspek Kemampuan

Pada aspek kemampuan ini sendiri meliputi akan kemampuan terhadap penyelesaian permasalahan dan pengetahuan. Dari kedua hal tersebut *AFP* berupaya untuk mengembangkan kedua poin tersebut.

##### a. Penyelesaian Permasalahan

Pelatihan pada bidang ini, AFP memberikan pelatihan terkait penyelesaian permasalahan geng motor melalui agenda *intelligence sharing*: pelacakan geng motor. Geng motor adalah salah satu komunitas di Australia yang menjadi salah satu kelompok yang masih eksis di tengah perkembangan modus-modus lainnya, dimana geng ini menyebarkan dan menjadi salah satu gerbong distributor terbesar di Australia, geng motor ini sering disebut dengan istilah *organization motorcycle crime gang syndicate (OMCGS)*.<sup>71</sup> Di Tengah kekhawatiran ini, yang menimbulkan keresahan Indonesia geng motor yang ada di Australia ini memiliki cabang komunitas di Indonesia, lebih tepatnya berada di Bali. Hal ini disebabkan Bali adalah tempat destinasi wisata yang paling disukai warga Australia, menjadikan segala sesuatu budaya yang ada di Australia memungkinkan akan berkembang juga di Indonesia. Salah satunya yakni modus adanya geng motor ini. Sehingga untuk mengantisipasi dan memberantas geng motor ini, di tahun 2016 dan 2018 Australia melalui organisasi AFP memberikan pengembangan keterampilan kepada Indonesia terkait pengidentifikasian yang bersifat intelejen, hingga penggunaan *tracing way* terhadap pemutusan jaringan ini.<sup>72</sup> Tentu saja dengan adanya *sharing intelejent* dan pelatihan ini membawa keuntung ke Indonesia, menjadikan keterampilan di bidang pelacakan Indonesia menjadi semakin berkembang.

---

<sup>71</sup> Fathurrohman. (n.d.). Konektivitas Jaringan Narkoba Indonesia – Australia. Retrieved January 9, 2022, from <https://kumparan.com/fathurrohman0920/konektivitas-jaringan-narkobaindonesia-australia-1ufvgtxC4EB/3>

<sup>72</sup> Ibid

## b. Pengetahuan

Pada pengetahuan ini terdiri dari pengetahuan topik permasalahan dan bahasa. Pengetahuan pada topik permasalahan dalam pembahasan penelitian ini mengarah kepada pembahasan terkait pengetahuan di bidang narkotika itu sendiri, mengingat narkotika adalah poin pembahasan yang sedang peneliti teliti pada kali ini, pengetahuan yang perlu diketahui dalam hal ini adalah perkembangan kejahatan narkotika di dunia internasional, sehingga Indonesia sendiri dapat mengantisipasi apabila terjadi kejadian serupa sesuai dengan beberapa kasus yang telah terjadi di beberapa negara lainnya. Pada penjelasan sebelumnya Indonesia khususnya BNN mempunyai kekurangan akan pengetahuan perkembangan narkotika di dunia Internasional, mengingat dalam beberapa sinergi yang telah dilakukan lebih berfokus terhadap perkembangan narkotika di dalam negeri. Sehingga pengetahuan terkait perkembangan kejahatan narkotika di Internasional dinilai kurang.

Selain terkait pengetahuan topik permasalahan, pengetahuan bahasan BNN juga dapat dikembangkan kembali. Sesuai dari penjelasan sebelumnya kemampuan berbahasa Inggris BNN masih dapat dikembangkan kembali. Sehingga dari kedua hal tersebut, AFP berupaya membantu mengembangkan pengetahuan BNN di bidang pengetahuan perkembangan kejahatan narkotika dan juga bahasa. Berikut beberapa agenda kegiatan yang dilakukan AFP guna mengembangkan pengetahuan badan penegak hukum BNN:

## 1. Pelatihan di Bidang *Dark Web*

Pada bidang *dark web* selain Australia melatih terkait keterampilan Indonesia di bidang pelacakan melalui. Australia juga memberikan pengenalan *dark web* secara rinci dan lebih mendalam kepada para petugas BNN. Agenda ini berbeda pada pelatihan pada poin sebelumnya, dimana di poin sebelumnya ditujukan untuk individu atau memiliki keterbatasan peserta yang dapat mengikuti pelatihan, pada pelatihan di poin ini diberikan Australia untuk keseluruhan para petugas BNN, pelatihan ini dilakukan secara online melalui perantara zoom. Pelatihan ini memberikan pengenalan kepada petugas BNN terkait bahayanya *dark web*, macam-macam kejahatan yang dapat berkembang di situs tersebut, dan juga terkait cara mengakses situs ilegal ini.<sup>73</sup> Pelatihan ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan umum kepada petugas BNN terkait *dark web*.

## 2. Pelatihan di Bidang *Enforcement*

Sebagai petugas penegak hukum patutnya setiap instansi yang ada di Indonesia khususnya BNN mampu dan mengetahui bagaimana cara melakukan penegakan hukum yang baik dan benar. Melalui pelatihan ini, AFP memberikan pengetahuan lebih mendalam terkait bahaya narkoba ke BNN, mengingat sebagai penegak hukum di bidang narkoba patutnya mampu mengetahui terkait bahayanya narkoba baik untuk diri sendiri maupun untuk di lingkungan sekitar.

---

<sup>73</sup> BNN, 2019, pelatihan Dark web dan cryptocurrency dari Australia federal police, Diakses melalui <https://jakselkota.bnn.go.id/pelatihan-dark-web-dan-cryptocurrency-dari-australian-federal-police-afp/>

Pada pelatihan yang telah dilakukan di tahun 2020 ini membahas terkait bahaya dari *transnational crime*, segala kejahatan yang tergolong pada macam-macam kejahatan transnasional. Pembahasan pada topik ini guna menguatkan integritas badan penegak hukum di bidang penanganan kasus yang telah melewati batas negara. Selanjutnya pada agenda yang sama dilakukan pembahasan dari salah satu bentuk kejahatan transnasional secara spesifik yakni narkoba, pembahasan ini membahas bagaimana cara pencegahan secara umum yang dapat dilakukan secara baik dan benar.<sup>74</sup> Dengan adanya agenda pada pelatihan ini dapat menambah pengetahuan para badan penegak hukum terkait bahaya dari narkoba, dan juga mendapatkan ilmu baru terkait perkembangan narkoba di dalam perspektif Australia.

### 3. *Intelligent sharing* ; Perkembangan cara-cara persembunyian dan penyamaran narkoba

Pertukaran informasi antara Indonesia dan Australia memang sedikit bermasalah setelah adanya kasus Bali nine, akan tetapi AFP tetap memberikan sejumlah informasi ke BNN secara umum atau secara general dari tahun ke tahunnya, khususnya terkait perkembangan cara-cara atau modus yang digunakan para sindikat narkoba internasional yang diketahui AFP berdasarkan kasus-kasus yang masuk ke Australia yang berasal dari negara lain. Seperti modus narkoba yang berasal dari negara

---

<sup>74</sup> Draft Tindak lanjut kerjasama yang tidak terpublish Indonesia dengan Australia, Tindak Lanjut Kerjasama 2021.pdf

Cina mempunyai ciri khas akan diapungkan di tengah laut dengan dibungkus kemasan teh. Informasi intelijen seperti ini yang dapat diberikan. Meskipun demikian hal ini tetap berguna dan bermanfaat bagi BNN, sebagai pengetahuan baru dan juga dapat mengembangkan pengetahuan badan penegak hukum Indonesia terkait perkembangan modus di dunia internasional. Sehingga para aparat penegak hukum dapat mengantisipasi akan adanya modus serupa yang masuk ke Indonesia. Pentingnya pertukaran informasi terkait hal ini digunakan untuk mencegah adanya modus-modus yang berkembang di Indonesia. Mengingat sesuai dengan adanya perkembangan teknologi, modus penyelundupan dan penyamaran narkoba selalu berubah ketika berhasilnya modus sebelumnya terbongkar.<sup>75</sup>

#### 4. *Intelligent sharing* ; Pelacakan Geng Motor

Agenda *Intelligent sharing* dalam pelacakan geng motor ini, juga termasuk ke dalam topik upaya peningkatan pengetahuan, dikarenakan selain untuk memperkenalkan cara melacak geng motor yang berasal dari Australia ini, Australia melalui AFP juga memberikan pengetahuan umum, terkait ciri-ciri dan modus geng motor Australia ini jika melakukan aksinya di Australia, sehingga Indonesia khususnya BNN dapat mengantisipasi kesamaan modus yang muncul, selain itu AFP juga menjelaskan terkait sejarah dan motif dari adanya geng motor ini. Hal ini ditujukan untuk

---

<sup>75</sup> Rika Motota dan Farranthi Shavitri, petugas BNN sub-bagian kerjasama Internasional Indonesia-Australia, wawancara.

menambah pengetahuan Indonesia terkait geng motor yang berasal dari Australia. AFP juga memberikan saran ke BNN untuk selalu mewaspadai salah satu modus ini, ditakutkan akan memunculkan geng motor lainnya.<sup>76</sup>

#### 5. Pelatihan Bahasa Inggris

Kemampuan dalam pengetahuan di bidang Bahasa Inggris dinilai sangat penting dalam salah satu strategi *tracing* mengingat, kejahatan narkotika adalah salah satu kejahatan transnasional yang mana melibatkan beberapa negara didalamnya. Akan tetapi dengan latar belakang akan pentingnya pengetahuan terkait Bahasa Inggris, Australia menilai Indonesia lemah akan kemampuan ini, hal ini dilihat dalam kasus Bali Nine yang mana adanya kesalahan penerjemahan, sehingga menjadikan penilaian kemampuan berbahasa Inggris Indonesia oleh Australia dinilai kurang maksimal.<sup>77</sup> Hal ini yang menjadikan latar belakang akan adanya pelatihan Bahasa Inggris yang diberikan Australia ke Indonesia melalui instansi AFP, yang memberikan pelatihan ke BNN dan Bea cukai Indonesia. Selain itu penguasaan Bahasa Inggris menjadi kunci penting di dalam upaya pemberantasan perdagangan gelap narkotika. Karena sebagai sebuah kejahatan transnasional sudah tentu bagi para penegak hukum mampu menguasai bahasa internasional.<sup>78</sup> Pelatihan Bahasa Inggris ini dilakukan

---

<sup>76</sup> Fathurrohman. 2021, Konektivitas Jaringan Narkoba Indonesia – Australia. Retrieved January 9, , from <https://kumparan.com/fathurrohman0920/konektivitas-jaringan-narkobaindonesia-australia-1ufvgtxC4EB/3>

<sup>77</sup> Detiknews, 2010, Salah Terjemahan Sidang Kasus Bali Nine Ditunda <https://news.detik.com/berita/d-1352967/salah-terjemahan-sidang-kasus-narkoba-anggota-bali-nine-ditunda->

<sup>78</sup> Farranthi Shavitri, petugas BNN sub-bagian Kerjasama Internasional Indonesia-Australia, wawancara.

secara rutin setiap tahunnya mulai dari tahun 2019. Pelatihan ini diberikan langsung oleh Australia dengan mengundang perwakilan instansi Indonesia untuk ke Australia secara langsung melakukan pelatihan Bahasa, akan tetapi pelatihan ini mengalami perubahan menjadi daring dikarenakan adanya pandemi mulai tahun 2020, sebelumnya setiap tahunnya agendanya dilakukan secara tatap muka langsung.<sup>79</sup>

## 2. Pelatihan pada Aspek Keterampilan

Pada aspek keterampilan meliputi terkait keterampilan menggunakan dan memanfaatkan teknologi juga keterampilan dalam kepemimpinan.

### a. Teknologi

Berdasarkan pada penjelasan di poin sebelumnya, bahwasanya keterampilan Indonesia di bidang teknologi dapat ditingkatkan kembali. Sehingga dengan ini AFP mengajukan beberapa pelatihan untuk para aparat penegak hukum Indonesia, khususnya BNN guna mengembangkan kapasitas kemampuan Indonesia di bidang ini, berikut beberapa pelatihan yang diberikan AFP ke BNN:

#### 1. Pelatihan *Dark web*

*Dark web* adalah kumpulan situs tersembunyi atau ilegal yang hanya bisa diakses oleh para pengguna *website* tertentu. Pada situs *dark web* ini menjaga dan menyediakan layanan pengguna anonim untuk menjaga sifat kerahasiaan data para pengguna. Penggunaan situs *dark web* digunakan

---

<sup>79</sup> BNN, 2019, International training of narcotics enforcement, <https://ppsdm.bnn.go.id/international-training-of-narcotics-enforcement/>

oleh mereka para anonim untuk terhindar dari pelacakan pemerintah.<sup>80</sup> Hal ini menjadikan tantangan baru dalam pemberantasan kejahatan transnasional ini, mengingat situ *dark web* ini tidak hanya melibatkan satu atau dua negara akan tetapi dibuka untuk semua penggunanya di setiap bagian negara di dunia.

Dalam penganalisisan dan penanganan kejahatan di metode ini membutuhkan keterampilan di bidang teknologi yang memumpuni, pada agenda sebelum adanya kerja sama dengan Australia, Indonesia dibantu oleh Amerika Serikat, dalam penganalisisannya. Untuk melepaskan ketergantungan terhadap Amerika, Indonesia melalui BNN memutuskan untuk meminta pelatihan ke Australia. Berdasarkan permintaan tersebut, Australia melalui *AFP (Australian Federal Police)* memberikan pelatihan di bidang ini, mengingat kemampuan dan keterampilan AFP di bidang intelijen begitu kuat. Dimulai dari tahun 2016 Australia telah mengenalkan Indonesia terkait kejahatan transnasional melalui *dark web*.<sup>81</sup> Metode yang diajarkan yakni terkait cara mengetahui pembeli anonim dan penjual anonim melalui *dark web*. Upaya *tracing* menjadi kurikulum dalam pengajaran lewat metode ini.<sup>82</sup>

Pelatihan ini juga membahas terkait penjualan narkoba yang dilakukan secara online, dan menggunakan *crypto currency* mata uang

---

<sup>80</sup> Kaspersky. 2021. Is the Dark Web Dangerous? What you need to know | Kaspersky. Kaspersky. <https://www.kaspersky.com/resourcecenter/threats/deep-we>

<sup>81</sup> History of the AFP | Australian Federal Police, 2021, from <https://www.afp.gov.au/about-us/our-organisation/history-afp>

<sup>82</sup> Kaspersky. 2021. Is the Dark Web Dangerous? What you need to know | Kaspersky. Kaspersky. <https://www.kaspersky.com/resourcecenter/threats/deep-we>

yang berlaku di internet. Pelatihan ini dilakukan setelah adanya pengamatan bahwasanya penjualan narkoba kini tidak hanya melalui sosial media akan tetapi kini telah menjajaki dunia *dark web*, dimana hal tersebut menandakan bahwasanya para pengedar mempunyai berbagai cara untuk melakukannya, sebagai aparat penegak hukum AFP menekankan untuk tidak lengah akan hal tersebut. Pada pelatihan tersebut para anggota BNN dilatih untuk dapat memetakan para sindikat internasional.<sup>83</sup> Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan bahwasanya Indonesia mulai berupaya untuk melepaskan ketergantungan penganalisisan *dark web* dari Amerika, melalui agenda pelatihan yang dilakukan dengan Australia ini kemampuan keterampilan dan jumlah aparat penegak hukum narkoba khususnya BNN dalam menganalisis para anonim yang menggunakan *dark web* sebagai situs jual beli narkoba bertambah hal ini diungkapkan oleh Bu Rika Motota estimasi penambahan jumlah SDM ini dari 5-10 orang, sehingga pelatihan ini memberikan dampak yang positif terhadap BNN, dan ketergantungan terhadap Amerika Serikat pun bisa di tekan.

## 2. Pelatihan *Social Media and Open-Source Intelligence Training (OSINT)*.

Adanya perkembangan era globalisasi juga membawa dampak terhadap perkembangan metode transaksi jual beli narkoba yang

---

<sup>83</sup> Wawancara BNN, 2022,  
[https://drive.google.com/folderview?id=1siPPrSGjppq9rgpq9Y48c2O\\_TyU6MYfl](https://drive.google.com/folderview?id=1siPPrSGjppq9rgpq9Y48c2O_TyU6MYfl)

digunakan para sindikat penjahat narkoba. Dimana sebelumnya metode transaksi jual beli dilakukan melalui tangan ke tangan, kini bisa dibeli melalui media sosial terdapat beberapa oknum yang menjual narkoba melalui media sosial dengan modus terselubung, yakni tanpa menyebutkan bahwasanya mereka menjual narkoba. Hal ini menjadikan tantangan terhadap Indonesia untuk dapat melacak aktivitas perdagangan narkoba melalui media sosial. Mengingat kurang sumber daya manusia Indonesia dalam penguasaan metode analisis ini, membuat *Australian Federal Police (AFP)* memberikan pelatihan *Social Media and Open-Source Intelligence Training (OSINT)* terhadap Badan Narkotika Nasional (BNN) RI.

Pelatihan ini menjadi agenda pelatihan tahunan yang ditujukan untuk memberikan pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan para analis untuk melakukan investigasi (online) secara efektif, dengan menggunakan alat sumber terbuka seperti Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain. Pelatihan ini ditujukan bagi para analis intelijen yang dapat memanfaatkan perangkat lunak dan alat *open source* canggih untuk menemukan data di berbagai platform media sosial di internet, sehingga nantinya para petugas intelijen dapat melakukan pengumpulan data intelijen yang dilakukan dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dengan mengembangkan teknologi intelijen dan pemutakhiran digital data. Pelatihan ini dijadwalkan akan dilaksanakan setiap tahunnya. Dengan ini

AFP dapat melihat dan mengawasi perkembangan kemampuan Indonesia dalam bidang ini.<sup>84</sup>

b. Kepemimpinan

Meskipun Australia menilai kepemimpinan Indonesia di beberapa aparat penegak hukum Indonesia konsisten akan keputusan dan taat akan hukum, pelatihan di bidang kepemimpinan dinilai masih patut untuk dilakukan, terlebih di BNN. Hal ini dikarenakan BNN adalah instansi yang mempunyai tanggung jawab penuh dan instansi yang memang dikhususkan untuk menangani kejahatan narkotika. Sehingga demi dapat mencetak beberapa kandidat para pemimpin yang dinilai dapat menjadi pemimpin yang berkualitas dan mempunyai keterampilan dalam memimpin BNN dengan segala tanggung jawabnya. Pelatihan ini dilakukan setiap tahunnya sejak tahun 2019, yang diberikan Australia melalui AFP yang diimplementasikan ke BNN. Pelatihan kepemimpinan ini dilakukan kepada kader-kader yang dinilai akan menjadi pemimpin selanjutnya di BNN, dimana pelatihan ini ditujukan untuk mengembangkan keterampilan dalam memimpin, bagaimana cara menjadi pemimpin yang berintegritas tinggi dan juga terkait keterampilan dalam manajemen pemberantasan kejahatan narkotika secara terukur.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Humas BNN, BNN RI – AFP Gelar Social Media and Open-Source Intelligence Training (OSINT) Tingkat Lanjutan, <https://bnn.go.id/50174-2/>

<sup>85</sup> Rika, Petugas BNN sub-bagian Kerjasama Internasional Indonesia-Australia, wawancara [https://drive.google.com/folderview?id=1siPPrSGjppq9rgpq9Y48c2O\\_TyU6MYflpe](https://drive.google.com/folderview?id=1siPPrSGjppq9rgpq9Y48c2O_TyU6MYflpe)

### 3. Pelatihan Perilaku atau Sikap

Dalam penjelasan sebelumnya sikap atau perilaku meliputi tanggung jawab, cara berkomunikasi dan lain sebagainya. Akan tetapi pada poin ini juga masih dinilai kurang di Indonesia, salah satunya di BNN didalam segi sikap tanggungjawab, yang mana masih banyak aparat penegak hukum yang menyeleweng dari tanggungjawab yang mereka punya. Dalam mengembangkan kualitas sikap atau perilaku yang dimiliki Indonesia khususnya pada entitas BNN RI, AFP memberikan pelatihan profesionalitas.

Berdasarkan latar belakang tingkat sikap tanggungjawab beberapa aparat penegak hukum yang dinilai kurang, dengan adanya beberapa penyelewengan tanggung jawab yang dilakukan beberapa aparat penegak hukum menjadikan pentingnya akan adanya peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum. Pelatihan ini diagendakan AFP memberikan materi pentingnya kepemilikan sifat profesionalitas yang harus dimiliki para aparat penegak hukum, sesuai dengan apa yang diungkapkan Bu Farranthi Shavitri dan Bu Rika Motota, pelatihan profesionalitas yang diadakan AFP ditujukan untuk para pegawai BNN guna dapat mengembangkan profesionalisme para pegawai, meningkatkan kedisiplinan, rasa tanggung jawab para pegawai, sehingga tidak akan mencampuradukan permasalahan instansi dengan hal diluar pekerjaan. Dan juga diagendakan untuk pemahaman akan hukum-hukum yang berlaku dalam penegakan hukum. Sehingga akan meningkatkan integrasi kepegawaian para aparat

penegak hukum.<sup>86</sup> Melalui pelatihan profesionalisme ini, dapat mengembangkan profesionalisme yang dimiliki pegawai BNN khususnya para pegawai muda.

b. Upaya AFP Mengembangkan Kapasitas BNN Secara Eksternal

Secara eksternal sendiri AFP masih belum membantu pengembangan kapasitas yang dimiliki BNN secara eksternal. Hal ini dikarenakan pada program-program yang dilakukan AFP dalam mengembangkan *capacity building* BNN lebih berfokus pada pengembangan sumber daya manusia petugas BNN, dan hal ini pula dilakukan secara berkelanjutan dan membutuhkan program berkelanjutan sehingga pengembangan pada kapasitas secara eksternal masih belum di berikan AFP terhadap BNN.

**2. Peran ABF Mengembangkan *Capacity Building* BNN dalam Menangani Kejahatan Narkotika.**

ABF atau *Australian Border Force* adalah instansi *customs* Australia. ABF menjadi salah satu instansi Australia yang mempunyai tanggung jawab untuk menegak hukum terkait kejahatan narkotika. Dalam menegakkan hukum untuk menangani kejahatan narkotika dibutuhkan kemampuan khusus. ABF mempunyai kemampuan dalam penegakkan hukum di bidang narkotika yang telah diakui dunia adalah pada bidang sistem pelacakannya, dan juga kemampuan *detector dog* yang dimiliki ABF. ABF sendiri dalam membantu mengembangkan *capacity building* BNN untuk menangani kejahatan narkotika

---

<sup>86</sup> Rika Motota dan Farranthi Shavitri petugas BNN sub-bagian kerjasama internasional Indonesia-Australia, 2022, wawancara

telah dilakukan beberapa hal dan sesuai dengan dua kategori yang dikemukakan oleh Enemark, meliputi:

a. Upaya AFP Mengembangkan Kapasitas BNN Secara Internal

Pengembangan kapasitas secara internal meliputi tiga aspek yakni kemampuan, keterampilan dan perilaku atau sikap.

1. Pelatihan Pada Aspek Kemampuan

Pada aspek kemampuan diperlukan adanya pengembangan dalam kemampuan penyelesaian permasalahan dan juga pengetahuan.

a. Penyelesaian permasalahan

Pelatihan pada bidang ini, dilakukan ABF melalui beberapa pelatihan, di antaranya pelatihan di bidang K-9 dan *vessel search*.

1. Pelatihan K-9

Dalam menyelesaikan, menghadapi permasalahan narkotika dibutuhkannya akan keterampilan dari K-9. K-9 sendiri adalah didefinisikan melalui kata *canine* yang berarti anjing cerdas, atau anjing pekerja yang memiliki kaitan akan penegakan hukum.<sup>87</sup> K-9 sendiri digunakan sebagai alat pelacakan salah satunya yakni pelacakan keberadaan narkotika, dimana K-9 memiliki daya sensorik dan pengindraan yang sangat kuat, sehingga menjadikan k-9 sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum. Akan tetapi, mengingat akan

---

<sup>87</sup> Handoyo, P., & Irawati, I. (2016). 40 Tahun "Perang Melawan Narkotika": Pengelolaan Narkotika oleh Negara, Perang Bukan Solusi. *Jurnal Peradilan Indonesia*, 5(1), 34. [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8PHZxozjAhVC6Y8KHR0ZCV8QFjAAe\\_gQIARAC&url=http%3A%2F%2Fmappifhui.org%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2017%2F03%2FTero-pong-Volume-5-Agustus2016-Januari-2017.pdf&usg=AOvVaw](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8PHZxozjAhVC6Y8KHR0ZCV8QFjAAe_gQIARAC&url=http%3A%2F%2Fmappifhui.org%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2017%2F03%2FTero-pong-Volume-5-Agustus2016-Januari-2017.pdf&usg=AOvVaw)

kemampuan dan keterampilan K-9 yang dimiliki Indonesia terhadap pelatihan K-9 yang masih kurang, sehingga Indonesia mengajukan kerja sama di bidang *capacity building* salah satunya yakni dalam pengembangan keterampilan K-9 yang dimiliki Indonesia ke Australia. Kerja sama ini meliputi pelatihan-pelatihan yang diberikan Australia melalui *ABF (Australian Border Force)*, mengingat *ABF* adalah instansi dalam negara Australia yang mempunyai wewenang dan kemampuan pelatihan *detector dog* yang handal dan kuat. Kerja sama di bidang pengembangan kapasitas ini dinilai sangat penting untuk dilakukan sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang.

Pelatihan ini secara resmi menjadi agenda kerja sama di antara *ABF* dan *BNN* di tahun 2018, sejak ditandatangani *MOU* di antara keduanya. Pelatihan ini dimulai dari mengembangkan keterampilan dalam melatih, manajemen dan keterampilan dalam *breeding* anjing K-9. Sama halnya dengan pelatihan peningkatan keterampilan lainnya, dalam mengembangkan *capacity building* di bidang K-9.<sup>88</sup>

Kegiatan pelatihan ini tentu saja telah mengembangkan kapasitas di bidang K-9 Indonesia, mengingat Australia juga memberikan beberapa poin saran yang harus dilakukan Indonesia dalam pembaharuan manajemen di bidang K-9, yang tentu saja dapat membantu pengembangan manajemen Indonesia di bidang K-9. Lain

---

<sup>88</sup>BNN, 2020, Optimalisasi Breeding untuk cetak pasukan K-9 hebat, <https://bnn.go.id/optimalisasi-breeding-untuk-cetak-pasukan-k9-hebat/>

hal itu dengan adanya hibah atau hadiah yang diberikan Australia ke Indonesia juga dapat membantu meningkatkan kapasitas jumlah dan juga pelatihan K-9 Indonesia.

## 2. Pelatihan *vessel search* (Pengeledahan Kapal)

Kasus kejahatan narkoba dalam bentuk penyelundupan sendiri ke wilayah negara Indonesia sering ditemui dan dilakukan oleh para sindikat melalui jalur perairan laut. Hal ini dikarenakan dengan letak geografi Indonesia yang dikelilingi oleh perairan laut sehingga memudahkan adanya penyelundupan melalui jalur pelabuhan-pelabuhan yang tidak terdeteksi oleh petugas penegak hukum. Alat yang digunakan untuk menyelundupkan narkoba ke wilayah perairan Indonesia sering ditemukan dengan menggunakan kapal nelayan, atau kapal yang memuat barang-barang. Sehingga pelatihan ini, ditujukan untuk mengembangkan keterampilan para penegak hukum dalam mengeledah kapal yang dicurigai membawa atau mengangkut narkoba.

Pelatihan ini juga dilakukan untuk mengasah keterampilan dan kepercayaan diri para aparat penegak hukum untuk melakukan pengeledahan kapal baik (perorangan maupun secara komersial) dan juga untuk mengembangkan kolaborasi antar lembaga dan negara. Pelatihan ini dilakukan oleh ABF terhadap BNN dan beberapa instansi lainnya.

Pelatihan ini terdiri dari beberapa agenda pelatihan, mulai dari pelatihan prosedur kesehatan dan keselamatan, pelatihan terkait pengamatan lingkungan yang dapat membahayakan keselamatan, pelatihan terkait pengidentifikasian ruang-ruang tertutup yang dinilai dapat dicurigai, pelatihan pengeledahan kapal kecil (nelayan) dan kapal besar atau kapal pesiar.<sup>89</sup> Dari pelatihan ini dapat mengembangkan keterampilan BNN dalam melakukan pengeledahan atau penindakan kasus di laut, mengingat sebagian besar masuknya kejahatan narkoba berasal dari laut.

b. Pengetahuan

Pada poin pengetahuan terdiri dari pengetahuan terkait topik permasalahan dan juga bahasa, untuk mengembangkan pengetahuan BNN, ABF melakukan beberapa kegiatan, meliputi:

1. ABF's webinar *series on transnational and serious organized crime* (TSOC)

Berhasil masuknya penyelundupan dari sindikat narkoba melalui jalur laut menunjukkan lemahnya pencegahan di perbatasan negara, dengan adanya beberapa kasus yang berhasil masuk ke Indonesia menjadikan Australia ikut prihatin dalam kondisi ini. Sehingga Australia melalui Instansi ABF memberikan pengetahuan ke Indonesia melalui webinar *series on transnational and serious organised crime* (TSOC) di tahun

---

<sup>89</sup> Putriani Sholihatun Nisa, 2022, Petugas Bea Cukai Indonesia sub-bagian Kerjasama Internasional Indonesia-Australia, wawancara DJBC

2021 dengan membahas tentang peredaran narkoba, *money laundering*, *countering terrorism* dan *violent extremism*, *supply chain security & cyber security* dan juga bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut melalui jalur perbatasan negara, dan juga beberapa faktor yang menjadikan suksesnya kegiatan penyelundupan ke dalam suatu negara, yang mana bukan lain adalah lemahnya pengawasan dan perbatasan.<sup>90</sup> Webinar ini diikuti oleh BNN. Webinar ini ditujukan untuk memperkuat dan menambah pengetahuan para petugas penegak hukum kejahatan narkoba di wilayah perbatasan menjadi lebih luas. Bentuk pelatihan-pelatihan yang diberikan Australia terhadap Indonesia ini adalah salah satu bentuk dukungan dari Australia ke Indonesia untuk melakukan pemberantasan kasus narkoba yang ada di Indonesia.

## 2. *Intelligent sharing* ; Perkembangan cara-cara persembunyian dan penyamaran narkoba

Meskipun adanya hambatan terjadinya pertukaran informasi di antara Indonesia-Australia setelah adanya kasus Bali Nine, akan tetapi dalam agenda mengembangkan pengetahuan terkait kejahatan narkoba secara internasional khususnya di Australia, ABF tetap memberikan informasi terkait perkembangan jenis-jenis narkoba yang baru ditemukan oleh ABF ke BNN di wilayah kerjanya, yakni di wilayah

---

<sup>90</sup> Admin BNN, 2021, Webinar Series Transnational Organised crime, <https://kalbar.bnn.go.id/webinar-series-transnational-organised-crime/>

*customs*, dikarenakan pada wilayah ini sering terjadinya aktivitas penyelundupan jenis baru narkoba ke Australia.<sup>91</sup> Dengan memberikan informasi terkait jenis-jenis baru narkoba yang ada di Australia. Hal ini dapat membantu mengembangkan dan menambah pengetahuan para petugas BNN terkait perkembangan munculnya jenis-jenis narkoba yang ada di Australia, sehingga dapat diantisipasi atau diwaspadai akan adanya kasus serupa.

### 3. Pelatihan Bahasa Inggris

Pelatihan Bahasa Inggris perlu diberikan ABF terhadap BNN, terlepas akan kurangnya pemerataan pengetahuan berbahasa yang dimiliki BNN. ABF menilai bahwasanya ketika dalam menangani kejahatan narkoba ini, akan melibatkan interaksi yang intens dengan negara-negara lain terkait pertukaran informasi tentang perkembangan kasus narkoba. sehingga penguasaan pengetahuan terkait Bahasa Inggris perlu dimiliki oleh BNN. Agenda kerja sama ini telah dilakukan sejak tahun 2018. Dimana pelatihannya dilakukan setiap tahunnya dengan mengirim beberapa anggota BNN ke Australia untuk mengikuti pelatihan, atau dengan media online.<sup>92</sup> Pelatihan yang telah dilakukan ABF ini juga dapat mengembangkan jumlah SDM petugas BNN menjadi lebih banyak yang dapat memahami Bahasa Inggris, tingkat

---

<sup>91</sup> Rika Motota, pegawai BNN Sub-bagian kerjasama internasional Indonesia-Australia

<sup>92</sup> BNN, 2019, Pelatihan Bahasa Inggris ABF BNN, diakses di <https://ppsdm.bnn.go.id/pelatihan-Bahasa-Inggris-ABF-BNN>. Pada tanggal 28 Desember 2022

integritas para pegawai pun semakin meningkat dengan bertambahnya dalam penguasaan berbahasa.

## 2. Pelatihan Pada Aspek Keterampilan

Pada aspek keterampilan ini meliputi keterampilan dalam penggunaan teknologi dan juga keterampilan dalam kepemimpinan.

### a. Teknologi

Keterampilan di bidang teknologi begitu penting untuk dimiliki dan dikembangkan terlebih untuk menangani kejahatan narkoba. Hal ini dikarenakan perkembangan kejahatan narkoba begitu dipengaruhi akan perkembangan globalisasi sehingga pemanfaatan teknologi dalam penyuksesan kejahatan ini begitu berpengaruh. Akan tetapi dikarenakan kemampuan dan keterampilan teknologi yang dimiliki ABF lebih mengarah pada penggunaan teknologi di area perbatasan atau area *customs*. Dimana wilayah kerja ini sangat berbeda dengan wilayah kerja BNN, sehingga pelatihan di bidang teknologi ini tidak diberikan oleh ABF dikarenakan adanya perbedaan tugas dan wilayah kerja. Apabila pelatihan ini tetap dilakukan oleh ABF akan tidak relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh BNN. Sehingga pelatihan atau pengembangan *capacity building* pada spek keterampilan teknologi tidak dilakukan.

### b. Kepemimpinan

Pada aspek keterampilan dalam memimpin ABF memberikan sejumlah pelatihan dalam kepemimpinan. Pada tahun 2019, pelatihan kepemimpinan dilakukan ABF kepada BNN, untuk dapat

mengembangkan pengetahuan para calon pemimpin BNN terkait kepemimpinan strategis, pengetahuan terkait sikap responsif yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin khususnya oleh BNN yang khusus menangani kejahatan narkoba, sehingga akan menghadapi segala jenis macam permasalahan. Pelatihan ini juga digunakan untuk memberikan edukasi terhadap para calon pemimpin BNN terkait pentingnya seorang pemimpin yang mempunyai ketajaman dalam melihat dan memprediksi akan terjadinya suatu fenomena.<sup>93</sup> Dengan adanya pelatihan ini dapat meningkatkan integritas dan kualitas pengetahuan yang dimiliki para calon pemimpin, sehingga akan dapat menjadi seorang calon pemimpin yang berkualitas.

### 3. Pelatihan Pada Aspek Perilaku atau sikap

Dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas perilaku atau sikap BNN, ABF memberikan pelatihan profesionalitas. Dengan adanya kasus yang telah terjadinya pelanggaran tanggung jawab oleh petugas BNN, ABF pada tahun 2019 mulai memberikan pelatihan profesionalisme terkait pentingnya kode etik di dalam organisasi, dengan adanya kode etik dapat menjadi suatu landasan dan agar petugas dapat berlaku profesional terhadap memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi atau sedang melakukan pelayanan. Pelatihan ini selain membahas terkait kode etik juga membahas terkait pentingnya mempunyai sikap profesional sebagai petugas penegak hukum, dengan memiliki sikap profesional yang tinggi akan meningkatkan

---

<sup>93</sup> Farranthi Shavitri, pegawai BNN sub-bagian kerjasama Internasional Indonesia-Australia

kepercayaan masyarakat terhadap petugas.<sup>94</sup> Melalui pelatihan profesionalisme ini, dapat mengembangkan profesionalisme yang dimiliki pegawai BNN dan juga meningkatkan integritas para pegawai.

b. Upaya AFP Mengembangkan Kapasitas BNN Secara Eksternal

Pada poin eksternal ini lebih difokuskan terhadap kapasitas sarana dan prasarana. Sebagai dukungan Australia terhadap penanganan kejahatan narkoba yang ada di Indonesia. Melalui ABF Australia memberikan bantuan hibah terhadap BNN berupa fasilitas Area Berpagar (*Dog Runs*) yang akan dibangun di kawasan Unit Deteksi K9 milik Badan Narkotika Nasional (BNN). Terdiri atas 20 unit *Dog Runs* seluas 3×9 meter per unit.<sup>95</sup>

Gambar 4.1 Hibah *Dog Run* ABF ke BNN



<sup>94</sup> Rika Motota dan Farranthi Shavitri petugas BNN sub-bagian kerjasama internasional Indonesia-Australia, 2022, wawancara

<sup>95</sup> Rika Motota, petugas BNN sub-bagian kerjasama internasional Indonesia-Australia, wawancara

Sumber:<https://bnn.go.id/tingkatkan-pertahanan-dari-narkoba-australia-support-k9/><sup>2019</sup>

Hibah ini diberikan ABF terhadap BNN dikarenakan adanya keterbatasan *dog runs* yang dimiliki BNN. *Dog runs* sangat memberikan keterpengaruhannya dalam proses pelatihan K-9. Selain memberikan hibah *dog runs* ABF juga memberikan hibah berupa K-9 sebanyak lima anjing pelacak terhadap BNN untuk menambah jumlah K-9 yang dimiliki BNN.<sup>97</sup> Sehingga akan memudahkan dan membantu upaya pelacakan yang dilakukan BNN.

Kerjasama di antara Indonesia dan Australia melalui BNN dengan ABF juga AFP di bidang *capacity building* sejauh ini membawa hal yang positif, dimana terdapat banyak perubahan ke hal yang positif dalam perkembangan kemampuan keterampilan, pengetahuan, dan sikap para petugas penegak hukum narkotika. Dari kerjasama yang telah diimplementasikan ini dalam bidang pengembangan sumber daya manusia dari sekian kerjasama yang telah dilakukan oleh Indonesia dengan negara lain, kerjasama dengan Australia salah satu yang terbaik, hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Bu Rika selaku petugas BNN Sub-bagian kerjasama internasional antara Indonesia dan Australia, hal ini dikarenakan respon Australia akan permintaan pelatihan yang diinginkan Indonesia juga terbilang sangat responsive meskipun sebelumnya ada beberapa ketegangan hubungan diplomatik di antara keduanya akan tetapi tidak

---

<sup>96</sup> BNN, 2019, Tingkatkan Pertahanan dari Narkoba Australia Support K-9, <https://bnn.go.id/tingkatkan-pertahanan-dari-narkoba-australia-support-k9/>

<sup>97</sup> Ibid

menghalangi kerja sama di bidang ini.<sup>98</sup> Dengan hal ini, semoga kerja sama dengan Australia bisa berlanjut di bidang *capacity building*.

Tabel 4.1 Matriks kerja sama di antara Indonesia-Australia

No.	Kerja sama	Internal	Eksternal
1.	AFP-BNN	a. Kemampuan 1. penyelesaian Permasalahan <i>(intelligent sharing: pelacakan geng motor)</i> 2. Pengetahuan <i>(dark web, enforcement, intelligent sharing: pelacakan geng motor, intelligent sharing: perkembangan cara persembunyian, Bahasa Inggris)</i> b. Keterampilan 1. Teknologi <i>(dark web, OSINT)</i> 2. kepemimpinan (Pelatihan kepemimpinan) c. Perilaku atau sikap (pelatihan Profesionalitas)	-
2.	ABF-BNN	a. Kemampuan 1. penyelesaian Permasalahan <i>(K-9, Vessel search)</i> 2. Pengetahuan <i>(TSOC, intelligent sharing: perkembangan cara persembunyian, Bahasa Inggris)</i> b. Keterampilan 1. kepemimpinan (Pelatihan kepemimpinan) c. Perilaku atau sikap (pelatihan Profesionalitas)	d. Sarana dan prasarana (hibah <i>dog runs</i> dan anjing k-9)

Matriks di atas adalah rangkuman dan gambaran secara sederhana kerjasama atau kegiatan apa saja yang diimplementasikan oleh AFP dan

<sup>98</sup> Rika Motota, petugas BNN sub-bagian Kerjasama Internasional Indonesia-Australia, wawancara

ABF dalam mengembangkan *capacity building* BNN. Kerja sama yang terjalin ini juga masih berkelanjutan atau dilaksanakan sampai sekarang.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Indonesia memiliki keterbatasan dalam tingkat mengembangkan *Capacity building* yang dimiliki. Sehingga Indonesia menggandeng Australia untuk melakukan kerja sama khususnya pada *Capacity building* di bidang kejahatan narkotika. Dalam hal ini, Australia sangat berperan dalam mengembangkan kemampuan *capacity building* Indonesia. Hal ini berdasarkan dari pelatihan-pelatihan yang berhasil diberikan Australia ke Indonesia, pelatihan-pelatihan ini meliputi:

##### **1. Sisi Internal**

Dari sisi internal pada konsep ini lebih berfokus pada kapasitas yang dimiliki sumber daya manusia dari entitas BNN RI. Sehingga Australia memberikan sejumlah pelatihan untuk mengembangkan aspek kemampuan, keterampilan dan sikap pada poin ini.

Hasil dari pelatihan ini membawa perubahan yang cukup baik bagi BNN RI. Dari aspek kemampuan SDM BNN dalam menangani permasalahan lebih berkembang secara signifikan. Keterampilan yang dimiliki sebelumnya semakin berkembang lebih baik dan juga jumlah SDM yang menguasai dan memahami teknik keterampilan inipun bertambah secara signifikan, dengan estimasi yang diberikan petugas BNN dari 5 menjadi 10 orang. Berkurangnya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum dalam

menyalahgunakan narkotika. Meningkatkan integritas pengetahuan kepegawaian BNN RI. Melatih para kandidat pemimpin instansi penegak hukum di bidang narkotika, sehingga pemimpin di kemudian hari memiliki pengetahuan yang luas dan juga berintegrasi yang tinggi.

## 2. Sisi Eksternal

Australia membantu mengembangkan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana K-9 untuk mendukung kemajuan dalam melakukan penanganan kejahatan narkotika. Dengan memberikan hibah fasilitas *dog run* dan juga memberikan sejumlah K-9 ke BNN RI.

Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya Australia berperan secara signifikan dalam mengembangkan *capacity building* BNN RI dalam menangani kejahatan narkotika. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya SDM dalam bidang keterampilan secara signifikan, berkembangnya pengetahuan pegawai secara luas, meningkatnya integritas kepegawaian BNN dan adanya kemajuan dalam sarana dan prasarana K-9 BNN RI

## B. Saran

Dengan ini peneliti memberikan saran ke Indonesia melalui progress yang kini telah dicapai, contoh saja di bidang K-9 untuk tetap dikembangkan secara mandiri, dimana harapan besarnya Indonesia melalui instansi manapun dapat mencetak K-9 dengan kemampuan tinggi melalui hasil pelatihannya sendiri. Juga, mengingat pelatihan yang diberikan Australia sebagian dilakukan ke instansi yang berbeda, sehingga hasil pelatihan yang telah dilakukan dapat

diinformasikan ke instansi lainnya, untuk menyamaratakan pengetahuan dan keterampilan setiap badan instansi penegak hukum.

Peneliti juga berharap, semoga beberapa kegiatan *Capacity building* yang dilakukan di antara Indonesia Australia kedepannya dapat dipublikasi secara keseluruhan sehingga, masyarakat dapat mengetahui perkembangan *Capacity building* yang dimiliki para aparat badan instansi penegak hukum narkotika dalam mengatasi kejahatan narkotika. Semoga Indonesia menjadi salah satu negara dengan kemampuan yang dapat diakui dunia Internasional dalam menangani kejahatan narkotika dari dalam maupun dari luar.

Selain itu, peneliti juga berharap untuk peneliti lainnya yang memiliki ketertarikan dalam meneliti kerja sama antara Indonesia-Australia, dapat meneliti Kerja sama Indonesia-Australia di bidang *law enforcement* atau penegakan hukum, yang mana menjadi salah satu kekurangan pembahasan pada penelitian ini.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andarmoyo, Sulistyono. 2012. *Keperawatan Keluarga Konsep Teori, Proses dan Praktik Keperawatan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Biddle, B.J dan Thomas, E.J. 1966. *Role Theory : Concept and Research*. NewYork : Wiley.
- BNN. 2019. *Indonesia Drugs Report 2019*, Jakarta Timur
- Bogdan, Robert. 1982. *Qualitative Research for Education; An Introduction to Theory and Methods*. London
- Brown, Lisanne, et. Al, 2001. *Measuring Capacity Building, Carolina population Center, University of North Carolina*, Chapel Hill.
- Creswell W. John. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Enemark, S. 2003. *Understanding the Concept of Capacity Building and the Nature of Land Administration Systems*. FIG Working Week
- Grindle, M.S. 1997. *Getting Good Government Capacity Building In The Public Sector Of Developing Countries*, Boston, MA : Harvard Institute for International Development
- Hasan, H. Iskandar dan Naramurti, Nina. 2013. *Kerja sama Kepolisian dan Penegakan Hukum Internasional*. Jakarta: PT Firris Bahtera Perkasa
- Lopa, Baharuddin. 1990. *Tindak Pidana Ekonomi*, Jakarta : Pradnya Paramita,
- Marpaung, Leden .1991. *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah Dan Pemecahan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Mulyasa. 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implikasi*, Bandung, PT Remaja Rosda Karya
- Natarajan, Mangai. 2015. *Kejahatan Dan Pengadilan Internasional*. Bandung : Nusa
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Subandi. 2011. *Ekonomi Pembangunan*. Cetakan Kesatu, Alfabeta, Bandung.

### Artikel dan Jurnal

- Abihail, Didier. 2017. Kerja sama Indonesia – Brasil Dalam Penanganan Perdagangan Narkotika Asal Brasil Di Indonesia Periode 2010-2015. *Journal of International Relations*. Volume 3, Nomor 3.
- Addo Putra Pradana, Yonathan. 2020. Kerjasama Indonesia-Nigeria dalam Menangani Jaringan Perdagangan Narkotika Nigeria di Indonesia Periode 2015-2017. *Journal of International Relations*. Volume 6, Nomor 3
- Aditya, Wisnu . 2017. *Kerjasama Pemerintah Indonesia Dengan Malaysia Dalam Menangani Peredaran Narkotika*. (Skripsi, UPN “Veteran” Yogyakarta)
- Agung Wicaksono, Mirza., Susiatiningsih, Hermini dan Hanuratahun, Marten. 2017. Kerjasama Indonesia Belanda Dalam Pencegahan Penyelundupan Narkotika. *Journal of International Relations*, vol. 3, no. 4

- Alfeini, Yulia.. 2017. Kegagalan Diplomasi Pemerintah Australia Dalam Pembebasan Terpidana Hukuman Mati Kasus Bali Nine Di Indonesia. *Jurnal of International Relations*, Vol. 3,
- Amaritasari. I. P. 2017. Keamanan Nasional dalam Konteks Isu-isu Global Kontemporer: Sebuah Tinjauan Hubungan Internasional. *Jurnal Keamanan Nasional*, 3(1), 109–132. <https://doi.org/10.31599/jkn.v3i1.19>
- Australian Federal Police. 2002. *inquiry into australia's relation with Indonesia*, Australian federal police submission, No.6
- Charles W. Kegley, Jr. dan Shannon I. Blanto. 2011. World Politics: Trend and Transformation. Boston, MA: Wadsworth Cengage Learning, 18-19 dalam, Umar Suryadi Bakry. 2017, *Dasar Dasar Hubungan Internasional Edisi Pertama*. Depok: Kencana,
- Junaedi, Junaedi. Ahmad Harakan, Elisa Indri Pratiwi Idris. 2019. Kerjasama Bnn Dan Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Vol. 5, No.1
- Kartika, Rahel dan Malau, Parningotan. 2021. Peran Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Penanggulangan Penyelundupan Narkotika Jalur Laut Di Kepulauan Riau. *Jurnal Hukum Ekonomi*. Vol. 7 No. 1
- Lamas, Lorenzo. 2017. *Kerjasama Amerika Serikat – Meksiko Dalam Merida Initiative Untuk Menanggulangi Peredaran Narkotika*. (Skripsi, Universitas Pasundan)
- Soeprpto, Riyadi. 2010. *The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance*. Word bank
- Suradi. 2002. Selintas : Pengembangan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Teknologi Pengembangan Masyarakat*. LPM STKSPRESS : Bandung
- Trisnha Setiaawan, Bagus. Ida Ayu Putu Widiati dan Diah Gayatri Sudibya, 2020, Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2, Nomor 3
- Wahono, Tri. 2019. Peranan Polri Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Boyolali (Studi Kasus Di Polres Boyolali), *Jurnal Bedah Hukum*. Vol.3, No.2
- Wati, Britina 2018, Koordinasi Antara Polri Dan BNN Dalam Melakukan Penyidikan Kasus Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Polda Sumatera Selatan Dan BNNP Sumatera Selatan), (Skripsi, Universitas Sriwijaya)
- Wijayanti, Yeni. 2021. Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia-Australia Tahun 1945-1995, *jurnal Artefak*

#### **Website**

- Australian Federal Police., 2022. History of the AFP | Diakses di <https://www.afp.gov.au/about-us/our-organisation/history-afp> pada tanggal 20 Desember 2022

- Australian Strategic Policy Institute. *Australia's Illicit Drug Problem is Getting Worse*. Diakses di <https://www.aspistrategist.org.au/australias-illicit-drugproblem-is-getting-worse/> pada tanggal 24 Desember 2022
- Bakesbangpol. Nd. *Badan Narkotika Nasional*. Diakses di <https://portal.kesbangpol.bandung.go.id/badan-narkotika-nasional-bnn/> pada tanggal 19 Desember 2022
- Bea Cukai, Diakses di <https://e-perpus.beacukaijuanda.net/sites/default/files/2022-04/WARTA%20BEA%20CUKAI%20JUNI%202021.pdf> pada tanggal 20 Desember 2022
- BNN Provinsi Kepulauan Riau. 2021. *Peran Strategis BNN Dalam Memperkuat Kesatuan Bangsa Untuk Melawan Narkotika*. Diakses melalui <https://kepri.bnn.go.id/peran-strategis-bnn-dalam-menguatkan-kesatuan-bangsa-untuk/>, pada tanggal 20 Desember 2022
- BNN. 2019. *International training of narcotics enforcement*. Diakses di <https://ppsdm.bnn.go.id/international-training-of-narcotics-enforcement/> pada tanggal 20 Desember 2022
- BNN. 2019. *pelatihan Dark web dan cryptocurrency dari Australia federal police*, Diakses melalui <https://jakselkota.bnn.go.id/pelatihan-dark-web-dan-cryptocurrency-dari-australian-federal-police-afp/> pada tanggal 20 Desember 2022
- BNN. 2019. *Tingkatkan Pertahanan dari Narkotika Australia Support K-9*, Diakses di <https://bnn.go.id/tingkatkan-pertahanan-dari-narkotika-australia-support-k9/> pada tanggal 07 Desember 2022
- BNN. 2020. *Optimalisasi Breeding untuk cetak pasukan K-9 hebat*, Diakses di <https://bnn.go.id/optimalisasi-breeding-untuk-cetak-pasukan-k9-hebat/> pada tanggal 07 Desember 2022
- BNN. 2021. *Darknet ruang kejahatan upaya memerangi narkotika bijak*, Diakses di <https://ntb.bnn.go.id/darknet-ruang-kejahatan-upaya-memerangi-narkotika-bijak/>, diakses pada tanggal 23 Desember 2022.
- BNN. 2021. *Narkotika dan sanksinya*. Diakses di <https://munakab.bnn.go.id/narkotika-sanksi-hukumnya/>. Pada tanggal 18 Desember 2022
- BNN. 2021. *Upaya Sindikat Narkotika dan Upaya menghindari Narkotika*, Diakses di <https://sumsel.bnn.go.id/upaya-sindikat-narkotika-upaya-menghindari-narkotika/#:~:text=Melakukan%20berbagai%20kegiatan%20positif%2C%20seperti,Selain%20cara%20tersebut.> Pada tanggal 22 Desember 2022
- BNN, 2019, *Pelatihan Bahasa Inggris ABF BNN*, diakses di <https://ppsdm.bnn.go.id/pelatihan-Bahasa-Inggris-ABF-BNN>. Pada tanggal 28 Desember 2022
- BNN. 2021. *Webinar Series Transnational Organised crime*. Diakses di <https://kalbar.bnn.go.id/webinar-series-transnational-organised-crime/> pada tanggal 20 Desember 2022
- BNN. Nd. *Laporan Laboratorium BNN*. Diakses di [https://laboratorium.bnn.go.id/asset/ppid/LKIP\\_.pdf](https://laboratorium.bnn.go.id/asset/ppid/LKIP_.pdf) pada tanggal 20 Desember 2022
- BNN. Nd./ *Profil BNN, Profil\_Badan\_Narkotika\_Nasional.pdf*

- BNN. Nd. *Profil BNN*. Diakses di <https://bnn.go.id/>. Pada tanggal 19 Desember 2022
- CNN Indonesia. 2018. *Memori atas kasus Bali Nine*. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181121135528-12-348095/memori-atas-kasus-bali-nine-sindikatan-penyelundup-narkoba> pada tanggal 18 Desember 2022
- CNN. 2014. dua pegawai BNN diduga jual barang bukti narkoba . Diakses di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141018183244-32-440794/dua-pegawai-bnn-diduga-jual-barang-bukti-narkoba> pada tanggal 20 Desember 2022
- Detiknews. 2010. Salah Terjemahan Sidang Kasus Bali nine ditunda Diakses di <https://news.detik.com/berita/d-1352967/salah-terjemahan-sidang-kasus-narkoba-anggota-bali-nine-ditunda> pada tanggal 22 Desember 2022
- Detiknews. 2010. *Salah Terjemahan Sidang Kasus Bali nine ditunda* Diakses di <https://news.detik.com/berita/d-1352967/salah-terjemahan-sidang-kasus-narkoba-anggota-bali-nine-ditunda> pada tanggal 20 Desember 2022
- Digital, M. 2020. *pengertian capacity building dan contoh penerapannya*, Diakses di <https://www.materidigital.com/pengertian-capacity-building-dan-contoh-penerapannya/> pada tanggal 20 Desember 2022
- Handoyo, P., dan Irawati, I. 2016. 40 Tahun Perang Melawan Narkotika: Pengelolaan Narkotika oleh Negara, Perang Bukan Solusi. *Jurnal Peradilan Indonesia*, 5(1), 34. Diakses di [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&c](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8PHZxozjAhVC6Y8KHR0ZCV8QFjAAe)  
ad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8PHZxozjAhVC6Y8KHR0ZCV8QFjAAe  
gQIARAC&url=http%3A%2F%2Fmappifhui.org%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2017%2F03%2FTeropong-Volume-5-Agustus2016-Januari-2017.pdf&usg=AOvVaw pada tanggal 25 Desember 2022
- Humas BNN. 2021. *BNN RI – AFP Gelar Social Media and Open-Source Intelligence Training (OSINT) Tingkat Lanjutan*, diakses di <https://bnn.go.id/50174-2/> pada tanggal 20 Desember 2022
- Indonesia embassy, 2011 ,Archived Media Release Minister for Home Affairs and Justice The Hon Brendan O’Connor MP. Diakses melalui [https://indonesia.embassy.gov.au/jakt/MRHAJM11\\_002.html](https://indonesia.embassy.gov.au/jakt/MRHAJM11_002.html). Pada tanggal 18 Desember 2022
- Kaspersky. 2021. Is the Dark Web Dangerous? What you need to know | Kaspersky. Kaspersky. Diakses di <https://www.kaspersky.com/resourcecenter/threats/deep-we> pada tanggal 24 Desember 2022
- Kompas. 2015. *BNN dukung dua terpidana kasus bali nine segera dihukum mati*, Diakses di <https://regional.kompas.com/read/2015/01/21/12584611/BNN.Dukung.Dua.Terpidana.Bali.Nine.Segera.Dihukum.Mati> pada tanggal 23 Desember 2022

- Liputan6. 2013. *pedagang narkoba di dark web terancam 20 tahun penjara*. Diakses di <https://www.liputan6.com/tekno/read/3669111/pedagang-narkoba-di-dark-web-terancam-20-tahun-penjara> pada tanggal 23 Desember 2022
- Morison, Keith Thomas. 2001. *Measuring Statistical Capacity Building: A Logic Framework Approach*. Diakses di <http://statisticsdepartement>, Pdf. Pada tanggal 20 Desember 2022
- National Council, Nd, *what capacity building?*, Diakses di [https://www-councilofnonprofits-org.translate.google/tools-resources/what-capacity-building?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=sc](https://www-councilofnonprofits-org.translate.google/tools-resources/what-capacity-building?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc) pada tanggal 20 Desember 2022
- NCA. 2016. *Drug trafficking*. Diakses di <https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/what-we-do/crime-threats/drug-trafficking>. pada tanggal 19 Desember 2022
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional, Diakses di <http://www.bphn.go.id/data/documents/10pr023.pdf> pada tanggal 23 Desember 2022
- Rika Suistia. 2018. Diakses di <https://psikologi.fisip-unmul.ac.id/main/wp-content/uploads/2016/06/Wawancara.pdf>, pada tanggal 7 Desember 2022
- Rusiana, Dewi. 2015. *Sejarah Bali Nine*, diakses di <https://elshinta.com/news/2297/0000/00/00/sejarah-bali-nine> pada tanggal 23 Desember 2022
- The hon Brendan O'connor MP. 2011. *nota kesepahaman untuk memerangi perdagangan obat-obatan terlarang*. [https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SMHAJM11\\_002.html](https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SMHAJM11_002.html)
- United nations office drugs and crime. N.d, *Drugs trafficking*. Diakses di <https://www.unodc.org/unodc/en/drugs-trafficking/>. Pada tanggal 18 Desember 2022
- United Nations. 2011. *Capacity Building*, Diakses di <https://www.un.org/en/academic-impact/capacity-building>. Pada tanggal 20 Desember 2022
- Wardah, Fathiyah. 2012. *Indonesia diduga jadi sasaran transaksi narkoba online*, Diakses di <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-diduga-jadi-sasaran-transaksi-narkoba-online--1143476876/106349.html>, Pada tanggal 21 Desember 2022

### **Undang-Undang**

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Bab VI Peredaran pasal 35

### **Wawancara**

Wawancara BNN, Rika Motota, sub-Bagian kerja sama internasional Indonesia dan Australia

Wawancara BNN, Farranthi Shavitri, sub-Bagian kerja sama internasional Indonesia dan Australia